



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Kependudukan dari aspek kuantitatif merupakan suatu kebijakan dalam mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) antara kelahiran, kematian dan persebaran penduduk sehingga akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan dan papan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Daerah untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur,

- pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
9. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
  10. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
  11. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
  12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
  13. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
  14. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
  15. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
  16. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  17. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
  18. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
  19. Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN

#### Pasal 2

- (1) GDPK merupakan perumusan visi dan misi berbagai instansi dan lembaga yang terkait dengan pembangunan kependudukan.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi panduan bagi :
  - a. PD dalam menyusun Dokumen Rencana Strategis PD dan Rencana

- Kerja PD;  
b. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RPJMD.

BAB III  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

GDPK terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : SITUASI, CAPAIAN DAN ANALISIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
BAB III : PROYEKSI DAN KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN  
BAB IV : VISI, MISI, ISUE STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
BAB VI : ROADMAP KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN DAN POKOK-POKOK PROGRAM  
BAB VII : PENUTUP

Pasal 4

GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 5

- (1) Pengendalian GDPK dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Pengendalian GDPK ini dilaksanakan oleh Tim Pengendali dibentuk oleh Keputusan Bupati.
- (3) Unsur Tim Pengendali terdiri dari OPD/Instansi Vertikal terkait, dan unsur Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan di Daerah.
- (4) Tim Pengendali bertugas melakukan sosialisasi, advokasi, monitoring dan evaluasi

BAB V  
BIAYA OPERASIONAL  
Pasal 6

Biaya operasional kegiatan GDPK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 27 Desember 2023  
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 27 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 26



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses penatakelolaan berbagai sumber daya yang ada termasuk Sumber Daya Manusia (SDM), yang menjadi modal pembangunan. Posisi manusia dalam pembangunan adalah sebagai subyek (*human kapital*) dan obyek (*human resources*) yang sangat penting dan harus dikendalikan kuantitasnya serta ditingkatkan kualitasnya meliputi 5 aspek penting. Pertama, berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk. Kedua, berkenaan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan dan angka kemiskinan, Ketiga, mobilitas penduduk seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi penyebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antar perkotaan dan pedesaan. Keempat, pembangunan keluarga serta yang Kelima, adalah penataan data based dan informasi penduduk.

Pembangunan Kependudukan dari aspek kuantitatif merupakan sebagai suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) antara kelahiran, kematian dan persebaran penduduk yang akan menciptakan berbagai perubahan, sehingga akan mempengaruhi terhadap *demand* yang harus dipenuhi oleh berbagai sektor seperti penyediaan kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan dan papan.

Tujuan Pembangunan Kependudukan tersebut adalah dalam rangka mencapai sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang yakni terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba serasi, selaras, dan seimbang serta berkesinambungan dalam hubungannya antar sesama manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam lingkungannya, serta bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Pembahasan tentang kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk bukan hanya menggambarkan persoalan kependudukan semata, tetapi lebih dari itu, yakni merupakan permasalahan pembangunan secara keseluruhan yang sedang dihadapi. Hal tersebut berkaitan juga dengan pemikiran secara konseptual bahwa hubungan

antara Kependudukan dan Pembangunan Ekonomi bersifat timbal balik, ketika variabel kependudukan diletakkan sebagai variabel bebas, maka setiap intervensi untuk mengatasi permasalahan kependudukan tersebut akan memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah pembangunan lainnya.

Lingkungan strategis, yang berskala nasional maupun internasional, telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika kebijakan kependudukan. Pada skala Internasional, kesepakatan hasil ICPD di Kairo tahun 1994, MDGs dan juga kesepakatan Internasional terakhir sebagaimana yang tertuang didalam dokumen Sustainability Development Goals (SDGs), yang telah menyebabkan perubahan orientasi kebijakan kependudukan sebagaimana terjadinya berbagai perubahan kebijakan dalam bentuk regulasi yakni terjadinya amandemen Undang-Undang No. 10 tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 52 tahun 2009 yang mengarahkan kebijakan Pembangunan Kependudukan pada penekanan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi telah mewarnai Program Keluarga Berencana.

Di skala kedaerahan ada dua aspek penting yang perlu dicatat; Pertama adalah perubahan kewenangan Pemerintah Daerah (otonomi daerah) dan yang Kedua, perubahan struktur pemerintahan di daerah sehingga perlu menyusun, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan, termasuk didalamnya kebijakan Pembangunan Kependudukan.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sedang membahas dan merumuskan suatu acuan bagi Pembangunan Kependudukan dimasa mendatang berupa kebijakan umum dalam bentuk *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). Hal ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi dari Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dalam penentuan kebijakan pembangunan kependudukan melalui pembentukan Tim Penyusunan dan Kelompok Kerja.

Melalui Keputusan Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 188.45/12.15/478/20/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2022-2047 telah dibentuk lima kelompok kerja untuk menyusun GDPK yang masing-masing bertanggungjawab untuk menyusun Grand Design termasuk Roadmap Pembangunan Kependudukan, kelima kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk ( Pokja I)
2. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk ( Pokja II)
3. Kelompok Kerja Bidang Penataan Pesebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk (Pokja III)
4. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga (Pokja IV)
5. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Database Kependudukan (PokjaV)

Kelima kelompok kerja tersebut telah bekerja secara maksimal dan telah menghasilkan konsep Grand Design yang diharapkan dapat menjadi landasan dan acuan bagi perumusan program atau kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Kabupaten Pakpak Bharat serta mengintegrasikannya dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lainnya.

Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan arahan kebijakan dalam tahapan dua puluh lima tahunan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat dengan melihat target pencapaian sampai dengan tahun 2045. Dalam dokumen ini dicantumkan pula roadmap yang berisi kebijakan yang diperlukan untuk tiap lima tahunan sampai tahun 2045, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas berkenaan dengan upaya-upaya yang perlu diambil oleh setiap OPD serta berbagai stakeholder dalam mendukung implementasi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat.

## **1.2. Dasar Hukum**

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ( Pembukaan, Pasal 28 B, pasal 33 dan 34)
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092 )
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
10. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
11. Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Rumah Tangga (KDRT)
12. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
14. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
15. Undang Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
16. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
18. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
19. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
20. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian
21. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
22. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
23. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
24. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
25. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan

26. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
27. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
28. Perda Pemrov SU No. 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
29. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2035
30. Keputusan Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 188.45/12.15/478/ 20/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2022-2047

### **1.3. Tujuan**

Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan Kabupaten Pakpak Bharat. Hal itu dilakukan melalui pencapaian tujuan Pembangunan Kependudukan.

Tujuan Pembangunan Kependudukan tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis daerah melalui penanganan secara komprehensif yang disesuaikan dengan kondisi dan tipologi masing-masing Kecamatan. Untuk itu diperlukan adanya landasan kerangka pikir sebagai acuan umum guna mendapatkan permasalahan,

**Gambar :1.1. Tujuan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat 2021-2045**



Berdasarkan pada Tujuan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat diatas, maka disusun arah pembangunan selama dua puluh lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, bermoral, dan berbudaya dengan dilandasi Iman dan Taqwa (Imtaq) dan Ilmu Pengentahuan dan Teknologi (Iptek), melalui pengelolaan pendidikan yang merdeka dan berkualitas.
2. Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan industri rumah tangga, khusus industri rumah tangga dilakukan kepada sasaran utama penduduk perempuan yang masih berstatus non pekerja (mengurus rumah tangga).
3. Menyediakan serta meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kemajuan

dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat.

4. Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
5. Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan Narkoba dan tindak kriminal lainnya.
6. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok difabel.

#### **1.4. Sasaran**

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak azasi manusia untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Pencapaian *window of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahannya mobilitas penduduk.
3. Pencapaian penduduk yang berkualitas melalui pembangunan keluarga yang bercirikan ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi, cerdas dan berkarakter serta mampu merencanakan sumber daya yang ada secara optimal.
4. Pembangunan data base kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat dapat dipercaya dan terintegrasi.

#### **1.5. Hubungan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat dengan Dokumen Perencanaan Lain.**

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah suatu dokumen rumusan Perencanaan Pembangunan Kependudukan Daerah selama 25 tahun kedepan dan dijabarkan setiap 5 tahun yang berisikan kecenderungan parameter kependudukan, isu-isu penting kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga serta

pembangunan manajemen data base dan informasi penduduk.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah adalah merupakan bagian integrasi dari Pembangunan Nasional, Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat.

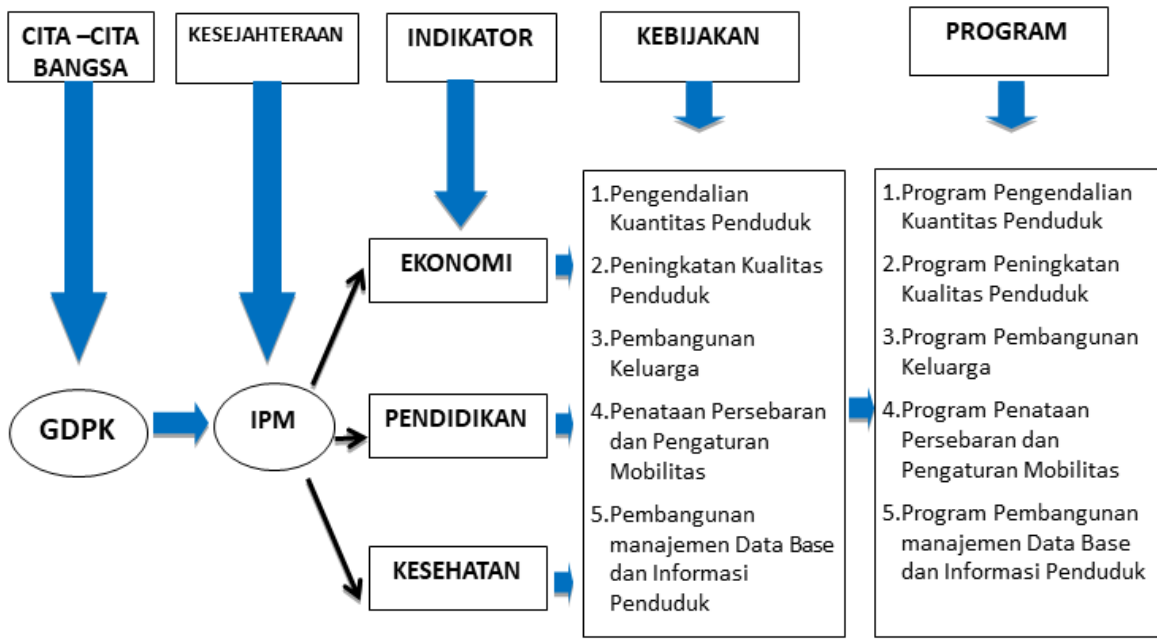
Tujuannya secara makro adalah tercapainya kondisi kependudukan yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan masyarakat dan bangsa, khususnya Kabupaten Pakpak Bharat.

Oleh karena itu, *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat disusun dengan berpedoman pada cita-cita bangsa termasuk didalamnya cita-cita masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat dalam mencapai kesejahteraannya melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berlandaskan kepada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang dilakukan melalui penyerasian kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan manajemen data base dan informasi penduduk.

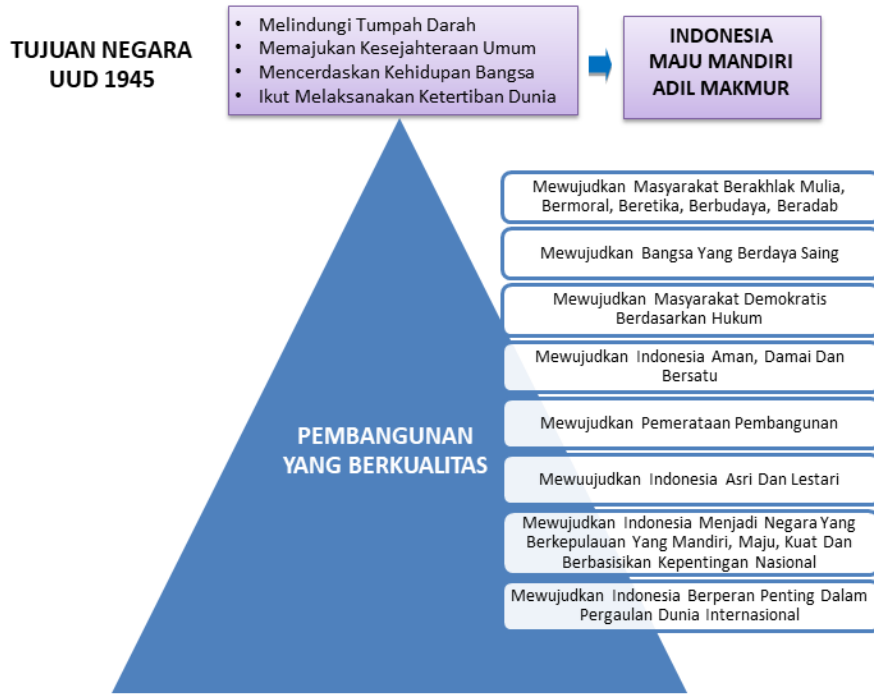
Sehubungan dengan hal tersebut, maka disamping dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Nasional 2011-2035, *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara 2011- 2035, *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan lain yang telah ada dan masih berlaku seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat dan Rencana Tata Ruang serta Rencana Strategis Kabupaten Pakpak Bharat dan lain sebagainya yang dipandang berhubungan dengan Pembangunan Kependudukan.

Seraca skematis kerangka pikir perumusan *Grand design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat tersaji dalam gambar berikut (gambar 1.2)

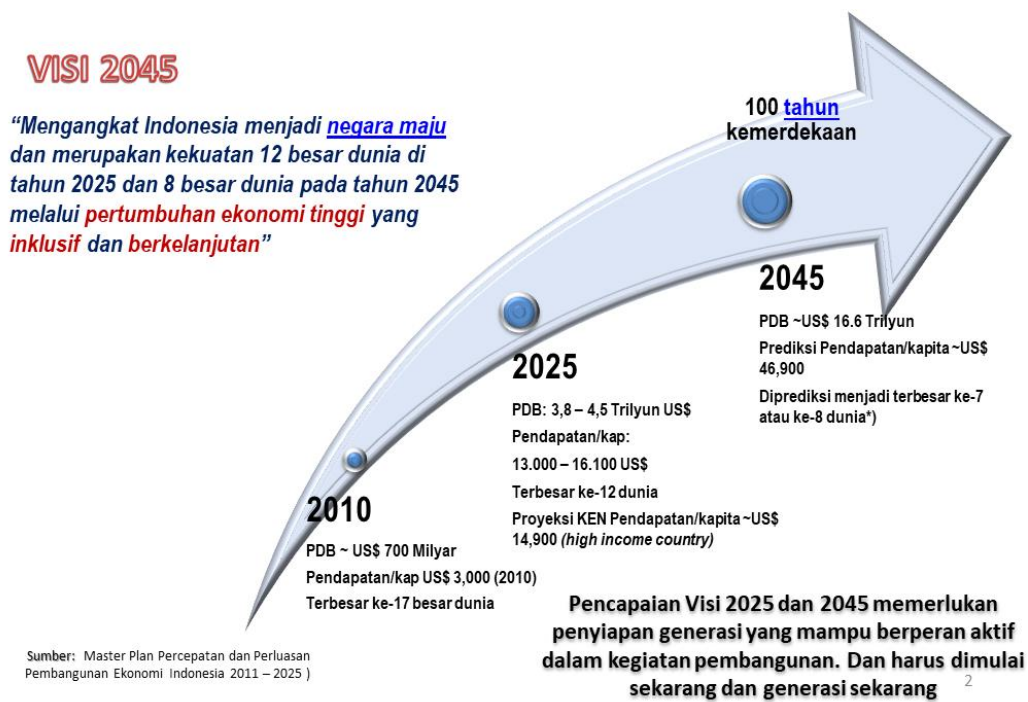
**Gambar: 1.2 Kerangka Pikir Perumusan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat 2021-2045**



**Gambar: 1.3. Arahannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Arahannya RPJM Nasional 2005 – 2025**



**Gambar: 1.4. Cita-cita Bangsa Indonesia Tahun 2045**



Untuk mencapai tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka Grand Design Pembangunan Kependudukan menjadi sangat penting dalam suatu proses perencanaan yang

disusun berdasarkan kajian kajian serta analisis yang mendalam terhadap data dan capaian dari berbagai variable serta indikator kelima pilar pembangunan kependudukan.

Untuk mencapai tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka Grand Design Pembangunan Kependudukan menjadi sangat penting dalam suatu proses perencanaan yang disusun berdasarkan kajian kajian serta analisis yang mendalam terhadap data dan capaian dari berbagai variable serta indikator kelima pilar pembangunan kependudukan.

## **BAB II**

### **SITUASI, CAPAIAN DAN ANALISIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang berbagai parameter dan indikator Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang berhubungan dengan kondisi saat ini dan beberapa tahun sebelumnya yang data dan informasinya berupa hasil capaian atau kinerja yang telah dilakukan didapat dari berbagai sumber terutama Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka, Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka serta profil atau laporan hasil capaian berbagai organisasi perangkat daerah. Adapun situasi dan capaian pembangunan kependudukan saat ini dapat diuraikan berikut ini.

#### **2.1. Kuantitas Penduduk**

##### **2.1.1. Kondisi Indikator Utama Kuantitas Penduduk**

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Tim Penyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Pakpak Bharat seperti tabel 2.1.1. dibawah ini, pada tahun 2017 terdapat jumlah penduduk sebanyak 47.183 jiwa, dan terjadi kenaikan pada tahun 2021 menjadi 53.315 jiwa atau terjadi pertambahan sebanyak 6.132 jiwa selama empat tahun (2017-2021) dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) setiap tahunnya sejak tahun 2017 sebesar 1,38 % turun dari tahun 2017 sebesar 2,28 %, yang salah satu faktor terjadinya penurunan LPP tersebut adalah dengan turunnya *Total Fertility Rate* (TFR) atau rata rata angka kelahiran anak dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada yakni sebesar 3,5 anak pada tahun 2021 dari 3,8 anak pada tahun 2017 yang diakibatkan oleh keberhasilan mendapatkan *Contraception Prevalensi Rate* (CPR) atau Peserta KB Aktif sebesar 74,2 % dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang diantaranya sebanyak 54,16 % adalah pengguna metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP ( MOW, MOP, Implant dan IUD), sedangkan perempuan yang kawin pada usia dibawah 19 tahun masih terdapat sebanyak 7,8 % dan unmetneed sebanyak 19,79 % pada tahun 2021.

<b>Tabel. 2.1.1. Kondisi Indikator Utama Kuantitas Penduduk</b>					
<b>Parameter/Indikator</b>	<b>Kondisi Saat Ini</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jumlah Penduduk (Jiwa)	47.183	48.119	48.935	52.351	53.315
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,72	1,98	1,7	2,51	1,38
Total Fertility Rate (TFR) (anak)	3,8	3,7	3,65	3,55	3,5
% Contraseption Prevalensi Rate (CPR)	72,6	74,8	74,5	77,1	61,8
PA Yang Menggunakan Metode Kontarepsi Jangka Panjang (MKJP)	50,68	50,66	53,37	54,13	54,16
% Perempuan Kawin Pertama dibawah usia 19 Tahun	-	-	-	-	7,8
Unmetneed	26,7	20,7	21,56	17,72	19,79
Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Sex Ratio)	100,41	100,69	100,75	100,67	100,81

Sumber : Tim Penyusun GDPK Pakpak Bharat

Catatan : % Perempuan Kawin Pertama dibawah Usia 19 tahun baru tersedia pada tahun 2021

### 2.1.2. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah seluas 1.218,30 km persegi atau sekitar 12.183 hektar, yang terluas adalah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe seluas 473,62 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Salak seluas 245,57 km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan yang terkecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu seluas 53,02 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut seluas 66,64 km persegi.

<b>Tabel 2.1.2. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat, 2021</b>
--

Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Luas Total Area (km <sup>2</sup> /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Salak	Salak	245,57
Sitellu Tali Urang Jehe	Sibande	473,62
Pagindar	Pagindar	75,45
Sitellu Tali Urang Julu	Ulu Merah	53,02
Pergetteng-getteng Sengkut	Kecupak	66,64
Kerajaan	Sukarame	147,61
Tinada	Tinada	74,03
Siempat Rube	Jambu Rea	82,36
Kabupaten Pakpak Bharat	Salak	1.218,30 (12.183 ha)
Sumber : Pakpak Bharat Dalam Angka Tahun 2021		

**Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran kode, data wilayah administrasi Pemerintah dan Pulau Tahun 2021**

### **2.1.3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan dan Sex Rasio Penduduk**

Berdasarkan data sebagaimana tabel 2.1.3. berikut Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2021 dihuni oleh penduduk sebanyak 53.315 jiwa, dengan persentase laju pertumbuhan sebesar 1,38 %. Kecamatan yang rendah laju pertumbuhan penduduknya adalah Kecamatan Pagindar sebesar 0,96 % dan yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya adalah Kecamatan Salak sebesar 1,95 %. Sedangkan Rasio Jenis Kelamin atau Sex Ratio yakni perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Pakpak Bharat adalah 102 atau lebih besar jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan atau setiap 100 penduduk perempuan

terdapat 102 penduduk laki-laki.

<b>Tabel 2.1.3. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat, 2021</b>			
<b>Kecamatan</b>	<b>Penduduk</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021</b>	<b>Rasio Jenis Kelamin Penduduk</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Salak	10.319	1,95	101
Sitellu Tali Urang Jehe	11.640	1,00	102
Pagindar	1.495	0,96	110
Sitellu Tali Urang Julu	4.397	1,32	105
Pergetteng-getteng Sengkut	4.831	1,26	102
Kerajaan	10.225	1,09	99
Tinada	4.929	1,58	103
Siempat Rube	5.479	1,73	105
Kabupaten Pakpak Bharat	53.315	1,38	102

#### **2.1.4. Penduduk Menurut Kelompok Umur**

Dari data pada tabel 2.1.4 berikut ini pada tahun 2021 terdapat penduduk Pakpak Bharat yang berada pada usia 0-4 tahun sebanyak 6.898 jiwa (12,9 %), penduduk yang berusia antara 5-9 tahun sebanyak 5.526 jiwa (10,4 %), penduduk usia 10-14 tahun sebanyak 5.260 jiwa (9,9 %), Penduduk usia 15-19 tahun sebanyak 5.192 jiwa (9,7) %, penduduk usia 20-24 tahun sebanyak 5.024 jiwa (9,4 %), penduduk usia 25-29 tahun sebanyak 4.337 jiwa (8,1 %), penduduk usia 30-34 tahun sebanyak 3.836 jiwa (7,2 %), penduduk usia 35-39 tahun sebanyak 3.610 jiwa (6,8 %), penduduk usia 40-44 tahun sebanyak 3.367 jiwa (6,3 %), penduduk usia 45-49 tahun sebanyak 2.688 jiwa (5,0 %), penduduk usia 50-54 sebanyak 2.169 jiwa (4,1 %), penduduk usia 55-59 tahun sebanyak 1.654 jiwa (3.1 %), penduduk usia 60-64 tahun sebanyak

1.281 jiwa (2,4 %), penduduk usia 65-69 tahun sebanyak 1.016 jiwa (1,9 %), penduduk usia 70-74 tahun sebanyak 751 jiwa (1,4 %) dan penduduk usia 75 tahun ke atas sebanyak 706 jiwa (1,3 %). Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat termasuk penduduk muda yakni usia 0-14 tahun sebanyak 32,3 % yang pada 15 tahun yang akan datang akan menjadi penduduk berusia 15-29 tahun, sehingga diperkirakan penduduk usia 15-64 tahun pada 5 tahun yang datang yakni pada tahun 2026 akan mencapai sekitar 67,7 %.

Tabel 2.1.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Pakpak Bharat , 2021			
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	3 535	3 363	6 898
5 – 9	2 778	2 748	5 526
10 – 14	2 731	2 529	5 260
15 – 19	2 686	2 506	5 192
20 – 24	2 561	2 463	5 024
25 – 29	2 255	2 082	4 337
30 – 34	1 927	1 909	3 836
35 – 39	1 836	1 774	3 610
40 – 44	1 767	1 600	3 367
45 – 49	1 412	1 276	2 688
50 – 54	1 049	1 120	2 169
55 – 59	820	834	1 654
60 – 64	564	717	1 281
65 – 69	434	582	1 016
70 – 74	330	421	751
75+	256	450	706
Pakpak Bharat	26 941	26 374	53 315
Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2022			

**2.1.3. Rasio Ketergantungan**  
Rasio

Ketergantungan atau rasio beban tanggungan dalam batasan studi demografi sering disebut sebagai *age dependency ratio*. Hal ini dikarenakan, rasio ini lebih merupakan perbandingan antara penduduk muda dan penduduk tua dengan penduduk usia

kerja. Meskipun tidak akurat secara ekonomi, rasio ketergantungan dapat menggambarkan banyaknya penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja. Dengan memperhatikan kedua rasio ketergantungan tersebut, untuk usia muda dan usia lanjut, dapat diketahui kelompok umur mana yang berkontribusi paling besar atau sedikit dalam rasio ketergantungan total.

Depedensi Rasio atau Rasio Ketergantungan berdasarkan usia penduduk Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2021 sebesar 60,1 % yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung sekitar 60-61 penduduk usia non produktif (penduduk usia 0-14 dan usia 65 tahun ke atas), diperkirakan 5 tahun yang akan datang rasio ketergantungan akan berada pada posisi mendekati 50 % dimana penduduk usia produktif menjadi sekitar 67-68 %.

Tabel 2.1.5 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pakpak Bharat dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021				
Kelompok Umur	Pakpak Bharat		Sumatera Utara	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
0-14	17.684	33,2	4.066.458	27,2
15-64	33.158	62,2	10.068.324	67,4
65 +	2.473	4,6	801.366	5,4
Rasio Ketergantungan		60,1		48,3
Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2022				

### 2.1.6. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

Jumlah dan persentase penduduk lanjut usia (lansia) dengan batasan 60 tahun keatas seperti tabel 2.1.6. dibawah ini, pada tahun 2021 terdapat sebanyak 3.754 jiwa atau sebesar 7,04 % dari jumlah penduduk 53,315 jiwa. Penduduk Lansia menurut jenis kelamin terdapat penduduk perempuan lebih banyak jumlahnya yakni sebesar 2.710 jiwa atau 57,8 %, penduduk Lansia laki-laki sebanyak 1.584 jiwa atau 42,2 %.

Tabel 2.1.6. Jumlah Penduduk Lanjut Usia ( 60 tahun ke atas)

## Kabupaten Pakpak Bharat , 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki Laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60 – 64	564	15,0	717	19,1	1281
65 – 69	434	11,6	582	15,5	1016
70 – 74	330	8,8	421	11,2	751
75+	256	6,8	450	12,0	706
Pakpak Bharat	1584	42,2	2170	57,8	3754

**2.1.7. Perilaku Fertilitas**

Fertilitas adalah suatu hasil reproduksi nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Angka fertilitas (kelahiran) sangat erat hubungannya dengan tingkat kesehatan masyarakat, khususnya dengan bidang Keluarga Berencana.

Ukuran yang sering digunakan untuk melihat angka fertilitas adalah *Total Fertility Rate* (TFR) yang berdasarkan sumber data dari pengumpulan data oleh Tim Penyusun GDPK bahwa TFR Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2017 sebesar 3,8 anak, dan pada tahun 2021 turun mejadi 3,5 anak sedangkan rata rata TFR Provinsi Sumatera Utara sudah mencapai 2,6 anak, suatu kondisi yang sangat mempengaruhi terhadap tidak tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang antara jumlah penduduk yang lahir dengan jumlah penduduk yang mati atau antara fertilitas dengan mortalitas serta terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan pada masa yang akan datang.

<b>Tabel 2.1.5. Total Fertility Rate ( TFR) Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017-2021</b>		
Propinsi/Kabupaten	TFR Tahun	
	2017	2021
(1)	(2)	(3)

<b>Pakpak Bharat</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>
<b>Sumatera Utara</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>
Sumber : Pengumpulan data oleh Tim Penyusun GDPK Pakpak Bharat		

### 2.1.8. Keluarga Berencana

Dalam rangka pengaturan kelahiran anak atau fertility, pemakaian alat kontrasepsi akan mempengaruhi wanita melalui status fakunditasnya (kemampuan melahirkan) dan melalui pemakaian alat kontrasepsi pula, wanita dapat mengatur panjang pendeknya masa ekspose terhadap kehamilan. dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi secara modern (Pil, IUD, Suntik, Implant, Kondom, MOW dan MOP).

Tingkat kesertaan ber-KB bagi penduduk tidak dapat terlepas dari pengetahuan, sikap dan praktek Keluarga Berencana, ini semua dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi penduduk seperti tingkat pendidikan, status ekonomi, daerah, desa atau kota.

### 2.1.8. Peserta KB Aktif

Pemakai alat kontrasepsi aktif (PA) diantara Pasangan Usia Subur di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2021 adalah sebanyak 4.335 akseptor atau sebesar 61,8 % dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 7.016 PUS.

Kecamatan yang tinggi persentase pencapaiannya Peserta KB Aktifnya adalah Kecamatan Pangindar sebesar 90,57 % atau sebanyak 240 akseptor dari sebanyak 265 PUS dan Kecamatan Salak sebesar 82,59 % atau sebanyak 987 akseptor dari sebanyak 1.195 PUS. Sedangkan yang terendah persentase capaian Peserta KB Aktifnya adalah Kecamatan Tinada sebesar 35,55 % atau sebanyak 294 akseptor dari sebanyak 827 PUS, selanjutnya Kecamatan Kerajaan sebesar 38,8 % atau sebanyak 498 akseptor dari sebanyak 1.285 PUS.

Pencapaian peserta KB aktif sebesar 61,8 % ini jika dibandingkan dengan *Total Fertility Rate (TFR)* yang masih cukup tinggi 3,5 anak, menunjukkan bahwa capaian peserta KB aktif belum efektif menurunkan TFR di Kabupaten Pakpak Bharat.

<b>Tabel 2.1.8. Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan akseptor aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat, 2021</b>				
<b>Kecamatan</b>	<b>Pasangan Usia Subur (PUS)</b>	<b>Akseptor Aktif</b>	<b>Persentase terhadap PUS</b>	<b>Akseptor Baru</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Salak	1 195	987	82,59	230
Sitellu Tali Urang Jehe	1 495	1 028	68,76	88
Pagindar	265	240	90,57	12
Sitellu Tali Urang Julu	563	460	81,71	33
Pergetteng-getteng Sengkut	669	415	62,03	68
Kerajaan	1 285	498	38,75	64
Tinada	827	294	35,55	61
Siempat Rube	717	413	57,60	44
Kabupaten Pakpak Bharat	7 016	4 335	61,8	600

Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2022

### 2.1.9. Peserta KB MKJP

Salah satu indikator untuk melihat efektif tidaknya pemakaian alat/cara kontrasepsi terhadap penurunan fertilitas adalah melalui komposisi pemakaian alat/cara kontrasepsi yang dipakai. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang atau MKJP yakni IUD, MOW, MOP dan Implant, jika semakin banyak komposisi yang menggunakannya maka semakin efektif Peserta KB Aktif di suatu daerah.

Adapun komposisi pemakaian alat/cara MKJP di Kabupaten Pakpak Bharat sudah cukup tinggi yakni sebesar 54,16 % yang telah menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang ( MOP, MOW, Implant dan IUD) dari seluruh peserta KB Aktif yang ada pada tahun 2021, kondisi ini terjadi kenaikan dari sebesar 50,68 % pada tahun 2017, 50,66 % pada tahun 2018, 53,37 % pada tahun 2019, dan menjadi 54,13 % pada tahun 2020. Capaian peserta KB MKJP ini juga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan fertilitas, hal ini kemungkinan besar disebabkan

karena capaian peserta KB aktif dan MKJP yang adalah mayoritas terdiri dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah berusia tua dan memiliki anak yang banyak atau Pasangan Usia Subur Usia Tua Paritas Tinggi (Pustuparti) bukan dari kalangan PUS Muda Paritas Rendah ( Pusmupar ).

<b>Tabel. 2.1.9. PA Yang Menggunakan Metode Kontarepsi Jangka Panjang (MKJP)</b>	
Tahun	Persentase
2017	50,68
2018	50,66
2019	53,37
2020	54,13
2021	54,16
Sumber : Pengumpulan data oleh Tim Penyusun GDPK Pakpak Bharat	

#### 2.1.10. Unmetneed

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tetapi tidak terpenuhi atau Unmetneed di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 menunjukkan persentase yang masih tinggi yakni sebesar 19,75 % dari Total Pasangan Usia Subur, walaupun sudah terjadi penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 sebesar 26,7 %. Perkembangan setiap tahunnya terjadi fluktuatif pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 20,7 % namun naik kembali pada tahun 2019 menjadi 21,56 % kemudian turun kembali menjadi 17,72 % pada tahun 2020, selanjutnya naik kembali menjadi 19,79 % pada tahun 2021.

Sasaran PUS yang unmetneed ini selain mudah untuk diajak menjadi peserta KB dikarenakan memang tidak menginginkan punya anak lagi atau yang ingin menunda kehamilannya juga menjadi pemenuhan terhadap hak-hak penduduk yang harus dipenuhi oleh pemerintah, serta sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan Sustainability Development Goals (SDGs).

**Tabel 2.1.10. Persentase Unmetneed di Kabupaten**

Pakpak Bharat tahun 2017-2021	
Tahun	Persentase
2017	26,7
2018	20,7
2019	21,56
2020	17,72
2021	19,79
Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2022	

#### 2.1.11. Umur Kawin Pertama Perempuan

Umur kawin pertama wanita usia subur merupakan faktor yang mempengaruhi turun naiknya total fertility rate (TFR) serta meningkatnya jumlah kematian atau kesakitan ibu akibat melahirkan anak pertama pada usia yang belum ideal yakni dibawah usia 21 tahun.

Berdasarkan data pada tabel 2.1.11 di bawah ini masih terdapat proporsi penduduk perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia di bawah 16 tahun sebanyak 3,28 % pada tahun 2021, pada usia 17-18 tahun sebesar 11,21 %, sehingga jumlah penduduk perempuan yang melakukan perkawinan pertama usia dibawah usia 19 tahun sebanyak 14,49 %. Sedangkan persentase perempuan usia kawin yang melakukan perkawinan pertama pada usia 19-24 tahun adalah yang terbanyak yakni sebesar 57,4 %, sehingga rata rata umur kawin pertama di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 22,57 tahun. Kondisi ini sudah cukup ideal untuk percepatan penurunan TFR di Kabupaten Pakpak Bharat hanya saja harus terus menerus di perhatikandan diupayakan penurunan pada penduduk perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada kelompok usia dibawah 19 tahun atau *Age Spesifik Fertility Rate* Usia dibawah 19 Tahun (ASFR <19 Thn).

Tabel 2.1.11. Proporsi Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Pakpak Bharat , 2021	
(1)	(2)
Usia Perkawinan Pertama	Tahun 2021

10 – 16	3,28
17 – 18	11,21
19 – 24	57,4
25 – 34	26,49
35 ke atas	1,62
Rata-rata Umur Perkawinan Pertama	22,57
Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2022	

## 2.2. Aspek Kualitas Penduduk

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Tim Penyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat bahwa kondisi kualitas penduduk yang terdiri dari bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi penduduk mengalami perkembangan sebagai berikut ;

- a. Pada Bidang Pendidikan, terdapat Rata Rata Lama Sekolah (RLS) selama 9,14 tahun pada tahun 2021, meningkat dari tahun 2017 hanya sebesar 8,47 tahun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) selama 13,87 tahun pada tahun 2021 terjadi juga kenaikan walaupun lamban dibandingkan pada tahun 2017 selama 13,82 tahun, Angka melek huruf pada tahun 2019 sebesar 97,79 % atau setiap 100 penduduk terdapat sebanyak 97-98 orang yang sudah melek huruf. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat pendidikan SD sebesar 105,1 % pada tahun 2020 dan pada tingkat SLTP sebesar 135,78 %. Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat pendidikan SD sebesar 65,3 % pada tahun 2021, turun dibandingkan pada tahun 2017 sudah mencapai 99,1 %, dan pada tingkat SLTP sebesar 59,91 % pada tahun 2021 terjadi penurunan dibandingkan kondisi pada tahun 2017 sebesar 98,32 %.
- b. Pada bidang Kesehatan, terdapat Jumlah Kematian Bayi sebanyak 10 jiwa pada tahun 2021, terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 sebanyak 5 jiwa, Tidak terdapat kasus Kematian Ibu melahirkan pada tahun 2021

walaupun terjadi 1 kasus/jiwa pada tahun 2018 dan 2019 serta 3 kasus/jiwa pada tahun 2020. Sedang Prevalensi Stunting pada tahun 2021 sebesar 21,28 % naik dibandingkan kondisi pada tahun 2019 sebesar 8,99 %, dan pada tahun 2020 sebesar 16,69 %. Dan Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2021 sebesar 65,96 tahun, naik dari kondisi pada tahun 2017 sebesar 65,05 tahun.

- c. Pada Bidang Ekonomi penduduk, terdapat rata rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Pakpak Bharat sebesar Rp. 973.906,-, terjadi kenaikan dari tahun 2017 sebesar Rp. 762.565,- per tahun per jiwa, sedangkan Pendapatan Perkapita pertahun Rp. 23.834.100,- dan telah terjadi kenaikan dari tahun 2017 hanya sebesar Rp.21.191.250,-. Gini Rasio terjadi pada kondisi 0,242 dan telah terjadi penurunan dari 0,256 pada tahun 2017. Sedangkan jumlah pekerja di bidang manufaktur sebanyak 12,28 % telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari kondisi hanya 0,37 % pada tahun 2017. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka penduduk usia 15 tahun ke atas di Kab. Pakpak Bharat hanya 1,36 % walaupun terjadi kenaikan jika dibandingkan kondisi pada tahun 2017 sebesar 0,49 %.

<b>Tabel 2.2.1. Parameter/Indikator Utama Pembangunan Kependudukan Pilar Kualitas Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017-2021</b>					
<b>Parameter/Indikator</b>	<b>KONDISI SAAT INI</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b><i>Pendidikan</i></b>					
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,47	8,48	8,73	9,03	9,14
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,82	13,83	13,85	13,86	13,87
Angka Melek Huruf	99,44	99,74	97,79		
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
- SD (%)	101,77	101,79	100,49	105,1	
- SLTP (%)	109,1	109,12	117,58	135,78	
Angka Partisipasi Murni (APM)					

- SD (%)	99,1	99,48	99,72	83,63	65,3
- SLTP (%)	98,32	98,64	98,86	99,21	59,91
<b>Kesehatan</b>					
Jumlah Kematian Bayi Lahir	5	10	7	8	10
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	0	1	1	3	0
Prevalensi Stunting (%)			8,99	16,69	21,28
Angka Harapan Hidup	65,05	65,27	65,59	65,74	65,96
Rata-Rata Lama Ibu Menyusui (bulan)	-	-	-	-	-
<b>Ekonomi</b>					
Pengeluaran Perkapita/Tahun	762 565	796 806	940 430	976 182	973 906
Pendapatan Perkapita/Tahun	21 191,35	22 589,02	23 767,28	23 282,25	23 834,10
Gini Rasio	0,256	0,239	0,279	0,248	0,242
% Pekerja di Sektor Manufaktur	0,37	2,51	5,64	4,27	12,28
Pengangguran Terbuka	0,49	0,44	0,18	1,93	1,36
Sumber : Tim Penyusun GDPK Pakpak Bharat					

### 2.2.1. Pendidikan

Sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu.cakap, kreatif, mandiri dan menjadi

masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab. Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan disektor pendidikan, seperti pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang dapat ditampung disetiap jenjang sekolah. Naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah tetapi bisa saja dapat dipengaruhi dengan semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah.

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, karena pendidikan menjadi penentu yang paling utama menciptakan daya saing yang membutuhkan sumber daya manusia yang handal guna menjawab semua tantangan perubahan yang sangat cepat dan semakin kompleks di Kabupaten Pakpak Bharat.

#### 2.2.1.1. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata rata lama sekolah serta harapan lama sekolah merupakan ukuran atau indikator utama dalam melihat indeks pembangunan manusia Adapun Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2021 berdasarkan data dari Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2022 adalah sebesar 9,14 tahun dan Harapan Lama Sekolah selama 13,87 tahun, sedangkan capaian rata rata Provinsi Sumatera Utara untuk Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 9,58 tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Kabupaten Pakpak Bharat, sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Utara sebesar 13,27 tahun atau lebih rendah dari capaian Kabupaten Pakpak Bharat.

<b>2.2.1.1. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pakpak Bharat dan Sumatera Utara Tahun 2021</b>		
Parameter	Kabupaten Pakpak Bharat	Provinsi Sumatera Utara
(1)	(2)	(3)
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,87	13,27
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,14	9,58

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022

#### 2.2.1.2. Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah penduduk erat kaitannya terhadap tingkat

kesejahteraan masyarakat suatu daerah, penyebab utama tidak sekolah atau putus sekolah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada umumnya adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang mendukung, di samping karena faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan, sarana dan prasarana di daerah yang kurang mendukung.

Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjelma menjadi faktor penghambat dalam pembangunan. Tingkat pendidikan yang tinggi berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah akan membuka peluang semakin majunya daerah tersebut. Namun tentunya jenjang pendidikan yang tinggi juga harus disertai dengan kualitas pendidikan yang baik pula.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD sederajat di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2021 sebesar 98,63 %, kemudian pada jenjang pendidikan SMTP sederajat sebesar 89,13 %, artinya terdapat sebanyak 9,5 % penduduk usia SD yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTP di Kabupaten Pakpak Bharat, selanjutnya pada jenjang pendidikan SMTA sederajat sebesar 80,48 % pada tahun 2021, yang berarti terdapat penduduk pada jenjang pendidikan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan atau drop out ke jenjang pendidikan SMTA sebanyak 8,65 %, namun demikian terdapat jumlah atau persentase murid semua usia dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan SD/Sederajat sebesar 110,46 %, SMTP sebesar 100,35 % serta sebesar 99,68 % pada jenjang pendidikan SMTA.

<b>2.2.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat, 2020 dan 2021</b>				
<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>		<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>	
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
SD/MI/Sederajat	98,73	98,63	109,58	110,46

SMP/MTs/ Sederajat	88,99	89,13	101,06	100,35
SMA/SMK/MA/Sederajat	80,11	80,48	94,97	99,68
Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2022				

### 2.2.1.3. Persentase Penduduk Yang Masih Sekolah

Bedasarkan kelompok umur penduduk yang masih sekolah di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2021 adalah; Kelompok Umur 7-12 tahun sebesar 99,76 % hampir sama dengan tingkat Provinsi sebesar 99,78 %, Kelompok Umur 13-15 tahun sebesar 96,98 % sedangkan tingkat Provinsi sebanyak 96,99 %, Kelompok Umur 16-18 tahun sebanyak 90,47 % lebih besar dari tingkat Provinsi yang hanya sebesar 78,66 % dan Kelompok Umur 19-24 tahun hanya sebesar 15,85 % lebih rendah dari tingkat Provinsi yang sudah mencapai 27,05 %, Kemudian Kelompok Umur 7-15 tahun sebanyak 98,31 % sedangkan tingkat Provinsi sebanyak 98,40 %, kemudian Kelompok Umur 7-24 tahun sebanyak 72,83 % dan tingkat Provinsi sebesar 68,01 %.

2.2.1.3. Persentase Penduduk Yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur Tahun 2021		
Kelompok Umur (Tahun)	Kab. Pakpak Bharat	Provinsi Sumatera Utara
(1)	(2)	(3)
7-12	99,76	99,78
13-15	96,98	96,99
16-18	90,47	78,66
19-24	15,85	27,05
7-15	98,31	98,40
7-24	72,83	68,01

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022

## 2.2.2 Kesehatan

### 2.2.2.1. Perilaku

#### Ibu Hamil

Salah satu indikator dari aspek kesehatan penduduk adalah mulai dari

perilaku Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan ketempat dan tenaga kesehatan tentang perkembangan kehamilan dan kondisi bayi dalam kandungan dan kondisi ibunya yang sedang hamil yang harus dilakukan 4 kali kunjungan yang disebut K1, K2, K3 dan K4.

Dari data yang ada pada tahun 2020 terdapat sebanyak 16.247 ibu sedang hamil dan sebanyak 13.710 atau 84,4 % yang melakukan kunjungan K1 dan sebanyak 12.560 yang melakukan K4 atau 77,3, dan yang Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 697 orang atau 4,3 % serta yang mendapatkan tablet zat besi sebanyak 12.584 atau sebanyak 77,5 %. Kondisi Ibu Hamil di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2020 ini baik jumlah maupun persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun tahun sebelumnya yakni 2019, 2018, 2017 dan 2016 sebagaimana data pada tabel 2.2.2.1. berikut ini.

**Tabel. 2.2.2.1. Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, KEK, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Pakpak Bharat , 2016 – 2020**

Tahun	Ibu Hamil	Melakukan Kunjungan K1		Melakukan Kunjungan K4		Kurang Energi Kronis (KEK)		Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2016	16237	14941	92,0	14336	88,3	597	3,7	7783	47,9
2017	16523	15598	94,4	15298	92,6	915	5,5	15316	92,7
2018	16711	15780	94,4	15099	90,4	976	5,8	13168	78,8
2019	16477	15090	91,6	14182	86,1	812	4,9	15090	91,6
2020	16247	13710	84,4	12560	77,3	697	4,3	12584	77,5

Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2021

### 2.2.2.2. Gizi Buruk Bayi Lahir

Disamping itu perilaku hidup sehat Ibu yang perlu mendapatkan perhatian adalah tentang kondisi bayi saat dilahirkan, apakah memiliki berat badan yang cukup atau rendah, apakah memiliki gizi cukup atau kurang dan buruk.

Tabel 2.2.2.2. dibawah memperlihatkan adanya data yang menunjukkan bahwa sebanyak 3 kasus gizi buruk pada tahun 2020 di Kabupaten Pakpak Bharat, kasus gizi buruk tersebut terdapat 1 kasus gizi buruk di Kecamatan Salak, dan 2 kasus di

Kecamatan Siempat Rube, sementara itu tidak terdapat kematian ibu hamil di Kabupaten Pakpak Bharat selama tahun 2020.

<b>Tabel 2.2.2.2. Jumlah Bayi Lahir dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kab. Pakpak Bharat , 2020</b>		
<b>Kecamatan</b>	<b>Balita Gizi Buruk</b>	<b>Kematian Ibu Hamil</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>Salak</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Sitellu Tali Urang Jehe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagindar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sitellu Tali Urang Julu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pergetteng-Getteng Sengkut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kerajaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tinada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Siempat Rube</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Kabupaten Pakpak Bharat</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2022		

### **2.2.2.3. Angka Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Umur harapan hidup penduduk Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020 sebesar 68,26 tahun masih dibawah angka harapan hidup rata rata Provinsi Sumatera Utara 69,10 tahun dan berada pada kelompok 10 Kabupaten/Kota yang terendah angka harapan hidupnya. Walaupun demikian telah terjadi kenaikan dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 67,47 tahun naik menjadi 67,57 pada tahun 2017, menjadi 67,79 pada tahun 2018 dan kemudian naik menjadi 68,11 pada tahun 2019 dan sebesar

68,26 pada tahun 2020.

**Tabel 2.2.2.3. Umur Harapan Hidup (eo) Kabupaten Pakpak Bharat dan Provinsi Sumatera Utara, 2016-2020**

No	Kabupaten/Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pakpak Bharat	67,47	67,57	67,79	68,11	68,26
2	Sumatera Utara	68,33	68,33	68,61	68,95	69,10

Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2022

## 2.2.3. Ekonomi

### 2.2.3.1. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita

Salah satu variabel penting dalam aspek ekonomi penduduk termasuk juga sebagai variabel yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Rata-Rata Pengeluaran Perkapita atau per jiwa penduduk yang dihitung dari pengeluaran penduduk dalam memenuhi kebutuhannya berupa dua jenis konsumsi utama yakni Makanan dan Non Makanan.

Pengeluaran Per Kapita per bulan penduduk Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021 (lihat tabel 2.2.3.1.) sebesar Rp. 973.906,- dengan pengeluaran kelompok jenis konsumsi Makanan sebesar Rp. 563.226,-(57,83 %) dan untuk jenis konsumsi Non Makanan sebesar Rp. 410.680,-, (42,17%) hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan rata-rata pengeluaran jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 976.182,- dengan kelompok jenis pengeluaran Makanan sebesar Rp. 574.158,- (58,82 %) dan kelompok pengeluaran Non Makanan sebesar Rp. 402.024,-(41.12 %).

Jika dilihat berdasarkan Kelompok Komoditas Makanan, terdapat data yang menunjukkan bahwa jenis pengeluaran yang terbesar adalah Makanan dan Minuman Jadi yakni sebesar Rp. 114.340,-, kemudian pengeluaran terbesar kedua adalah Padi padian atau beras sebesar Rp. 98.398,- dan jumlah pengeluaran terbesar ke tiga adalah Rokok sebesar Rp. 93.807,-, sedangkan jenis makanan yang mengandung kualitas gizi tinggi seperti Ikan/ Udang/Cumi/Kerang hanya sebagai pengeluaran yang terbesar ke empat sebesar Rp. 65.358,-, Sayur-sayuran menjadi pengeluaran yang kelima sebesar Rp. 45.491,- sedangkan Telur dan Susu, Buah buahan dan Daging hanya di urutan ke enam, tujuh dan delapan.

<b>Tabel 2.2.3.1. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020-2021</b>		
<b>Kelompok Komoditas</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(1)	(2)	(3)
<b>Makanan</b>		
Padi-padian	104 441	98 398
Umbi-umbian	5 951	4 385
Ikan/udang/cumi/kerang	64 265	65 358
Daging	25 547	21 586
Telur dan susu	33 951	29 177
Sayur-sayuran	41 339	45 491
Kacang-kacangan	8 756	9 230
Buah-buahan	30 600	22 103
Minyak dan kelapa	17 294	18 584
Bahan minuman	21 760	22 126
Bumbu-bumbuan	11 281	11 532
Konsumsi lainnya	6 888	7 108
Makanan dan minuman jadi	121 536	114 340
Rokok	80 548	93 807
<b>Jumlah makanan</b>	<b>574 158</b>	<b>563 226</b>
<b>Bukan makanan</b>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	162 349	162 648
Aneka barang dan jasa	109 030	112 874
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	38 556	32 507
Barang tahan lama	42 742	52 057
Pajak, pungutan, dan asuransi	36 659	43 750
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	12 688	6 845

Jumlah bukan makanan	402 024	410 680
Jumlah	976 182	973 906
Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2022		

### 2.2.3.2. PDRB Per Kapita

Dari aspek Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita berdasarkan harga berlaku, terdapat data (lihat tabel 2.2.3.2) yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Pakpak Bharat PDRB perkapita pertahun atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp. 23.767.278,- terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 23.282.247,- dan terjadi kenaikan kembali pada tahun 2021 sebesar Rp. 23.834.097,- dengan demikian telah terjadi kenaikan PDRB per Kapita, kecuali pada tahun 2020 penurunan hal ini disebabkan akibat pandemi covid 19, berbeda dengan kondisi pada level Provinsi Sumatera Utara terjadi kenaikan setiap tahunnya sejak tahun 2019 sebesar Rp. 54.620.404,- menjadi Rp. 54.979.044,- pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp. 57.569.793,-. Capaian PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Pakpak Bharat jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian PDRB perkapita Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.2.3.2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2019 – 2021**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Pakpak Bharat	23 767 278	23 282 247	23 834 097
Sumatera Utara	54 620 404	54 979 044	57 569 793

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022

### 2.2.3.3. Penduduk Usia Kerja dan Pengangguran Terbuka

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja adalah sebanyak 29.775 jiwa atau sebesar 98,6 % dari sebanyak 30.185 penduduk angkatan kerja, sedangkan jumlah penduduk yang berstatus pengangguran sebanyak 410 jiwa atau sekitar 1,36 %.

Diantara penduduk yang bekerja terdapat sebanyak 13.954 perempuan dan sebanyak 15.821 jiwa laki-laki, serta yang pengangguran terbuka terdiri dari 88 jiwa perempuan dan 322 jiwa laki-laki.

Dari 4.235 jiwa penduduk bukan angkatan kerja terdapat yang sedang sekolah sebanyak 1.459 jiwa, yang mengurus rumah tangga sebanyak 2.021 jiwa sebagian besar adalah perempuan (1.750 jiwa) dan terdapat sebanyak 755 jiwa yang lainnya. ( lihat tabel 2.2.3.3).

**Tabel 2.2.3.3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pakpak Bharat, 2021**

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja	16 143	14 042	30 185
1. Bekerja	15 821	13 954	29 775
2. Pengangguran Terbuka	322	88	410
II. Bukan Angkatan Kerja	1 247	2 988	4 235
1. Sekolah	485	974	1 459
2. Mengurus Rumah Tangga	271	1 750	2 021
3. Lainnya	491	264	755
Jumlah	17 390	17 030	34 420

Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2021

#### 2.2.3.4. Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan

Jika dilihat data tentang pendidikan penduduk berumur 15 tahun keatas yang termasuk kelompok Angkatan Kerja (AK) terdapat yang berstatus bekerja dari kalangan berpendidikan SD dan tidak tamat SD sebanyak 8.268 jiwa atau 100 % dari jumlah angkatan kerja yang berpendidikan sama, yang tamat SMP sebanyak 6.452 jiwa atau 98,91 %, SMA sebanyak 10.360 jiwa atau 97,31 %, dari jumlah angkatan kerja yang berpendidikan sama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pekerja menurut pendidikan tertinggi yang berada pada tingkat pendidikan SMP dan SMA lebih kecil jika dibandingkan dengan yang berpendidikan SD berdasarkan jumlah maupun secara persentase dengan jumlah penduduk yang berpendidikan setara.

Tabel 2.2.3.4. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pakpak Bharat, 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ Sekolah Dasar (SD)	8 268	0	8 268	100
Sekolah Menengah Pertama	6 451	71	6 522	98,91
Sekolah Menengah Atas	10 360	286	10 646	97,31
Perguruan Tinggi	4 696	53	4 749	98,88
Jumlah	29 775	410	30 185	98,64

Jika dilihat data tentang status

pekerjaan utama penduduk, maka jumlah yang terbanyak adalah kelompok Pekerja Keluarga/tak dibayar sebanyak 11.532 jiwa kemudian kelompok yang berusaha

dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 9.043 jiwa, kemudian yang bekerja sebagai Buruh/karyawan/pegawai sebanyak 4.880 jiwa, kemudian yang berusaha sendiri sebanyak 2.177 jiwa, Pekerja Bebas sebanyak 1.887 jiwa dan yang Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar hanya sebanyak 256 jiwa.

<b>Tabel 2.2.3.5. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pakpak Bharat, 2021</b>			
Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	1 171	1 006	2 177
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	6 508	2 535	9 043
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	220	36	256
Buruh/Karyawan/Pegawai	2 616	2 264	4 880
Pekerja bebas	1 468	419	1 887
Pekerja keluarga/tak dibayar	3 838	7 694	11 532
Jumlah/Total	15 821	13 954	29 775

### 2.2.3.6. Gini Rasio

Adapun Gini rasio atau jarak kesenjangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Pakpak Bharat lebih baik dari rata-rata Provinsi Sumatera Utara yakni 0,2791 pada tahun 2019 dan menurun menjadi 0,2475 pada tahun 2020, serta turun kembali menjadi 0,2421 pada tahun 2021. Sedangkan rata rata Gini Rasio penduduk Provinsi Sumatera Utara berada pada 0,3165 pada tahun 2019 serta pada posisi 0,3161 pada tahun 2020 dan menjadi 0,3145 pada tahun 2021.

**Tabel 2.2.3.6. Gini Ratio Tahun 2019, 2020,2021 Kabupaten Pakpak Bharat dan Provinsi Sumatera Utara**

Daerah	Tahun		
	2019	2020	2021

(1)	(2)	(3)	(4)
Pakpak Bharat	0,2791	0,2475	0,2421
Provinsi Sumut	0,3165	0,3161	0,3145

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022

### 2.2.3.7. Rasio Ketergantungan Pekerja dan Non Pekerja

Jika ingin melihat Rasio Ketergantungan secara riil dapat kita lihat dari angka beban ketergantungan penduduk pekerja dibandingkan dengan penduduk yang tidak bekerja. Dari data pada tabel 2.2.3.7 dibawah ini terdapat jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 29.775 jiwa, sedangkan penduduk yang tidak bekerja sebanyak 25.809 jiwa, (terdiri dari Pengangguran, penduduk yang sedang sekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga, penduduk usia 0-14 tahun serta penduduk yang tidak bekerja disebabkan faktor lainnya) maka angka ketergantungan penduduk tidak bekerja terdapat sebesar 86,7 %, atau setiap 100 penduduk berkerja di Kabupaten Pakpak Bharat menanggung sebanyak 86-87 jiwa penduduk yang tidak bekerja.

Tabel. 2.2.3.7. Penduduk Bekerja dan Bukan/Tidak Bekerja serta Rasio Ketergantungan Pekerja di Kabupaten Pakpak Bharat, 2021

Jenis Kegiatan Utama	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja Yg Bekerja	<b>15821</b>	<b>13954</b>	<b>29775</b>
1. Bekerja	15821	13954	29775
II. Tidak/Bukan Bekerja	<b>11369</b>	<b>14440</b>	<b>25809</b>
1. Pengangguran	322	88	410
2. Sekolah	1247	2988	4235
3. Mengurus Rumah Tangga	485	974	1459
4. Lainnya	271	1750	2021
5. Penduduk Usia 0-14 tahun	9044	8640	17684
Jumlah Penduduk	<b>27190</b>	<b>28394</b>	<b>55584</b>

III. Rasio Ketergantungan Pekerja	71,9	103,5	86,7
-----------------------------------	------	-------	------

Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2022

## 2.3. Persebaran Dan Mobilitas Penduduk

### 2.3.1. Persebaran Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Sedangkan migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk yang menunjukkan terjadinya mobilitas penduduk yang keluar dan masuk dalam suatu wilayah.

Mobilitas penduduk ada yang bersifat nonpermanen (sementara) misalnya turisme baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen (menetap). Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap.

Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi penduduk dapat dikembangkan optimal.

Secara umum distribusi penduduk di kabupaten Pakpak Bharat tersebar hampir merata jika dibandingkan menurut persentase jumlah penduduk dan persentase luas wilayah masing masing Kecamatan yakni terdapat Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu yang luas wilayahnya seluas 473,62 km persegi atau 38,87 % atau terluas pertama dari luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat seluas 1.218,30 dihuni oleh penduduk sebanyak 11.640 jiwa atau hanya 21,83 % atau persentase tertinggi pertama dari jumlah penduduk Pakpak Bharat sebanyak 53.315 jiwa, demikian juga dengan Kecamatan Kerajaan seluas 147,61 km persegi atau 12,12 % ( terluas kedua) dari luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat dihuni oleh penduduk sebanyak 10.225 jiwa atau 19,18 % ( terbanyak kedua) dari Jumlah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat. Demikian juga dengan berbagai Kecamatan lainnya yang terjadi keimbangan antara luas lahan/wilayah dengan jumlah penduduk yang menghuninya.

Tabel 2.3.1. Luas Daerah Dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat, 2021				
Kecamatan	Luas Total (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Salak	245,57	20,16	10 319	19,35
Sitellu Tali Urang Jehe	473,62	38,87	11 640	21,83
Pagindar	75,45	6,19	1 495	2,8
Sitellu Tali Urang Julu	53,02	4,35	4 397	8,25
Pergetteng-getteng Sengkut	66,64	5,47	4 831	9,06
Kerajaan	147,61	12,12	10 225	19,18
Tinada	74,03	6,08	4 929	9,25
Siempat Rube	82,36	6,76	5 479	10,28
Kabupaten Pakpak Bharat	1 218,30	100	53 315	100

Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2022

### 2.3.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km<sup>2</sup> pada suatu wilayah .

Dari luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 1.218,30 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 53.315 jiwa maka terdapat kepadatan penduduk sebesar 43,76 jiwa per km<sup>2</sup>.

Kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu sebanyak 82,93 jiwa per km<sup>2</sup> dan Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut yaitu 72,49 jiwa per km persegi, sedangkan kecamatan terjarang

penduduknya adalah Kecamatan Pagindar yaitu 19,81 jiwa per km<sup>2</sup> dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe sebanyak 24,58 jiwa per km persegi.

Kecamatan	Luas Total (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(4)	(4)
Salak	245,57	10 319	42,02
Sitellu Tali Urang Jehe	473,62	11 640	24,58
Pagindar	75,45	1 495	19,81
Sitellu Tali Urang Julu	53,02	4 397	82,93
Pergetteng-getteng Sengkut	66,64	4 831	72,49
Kerajaan	147,61	10 225	69,27
Tinada	74,03	4 929	66,58
Siempat Rube	82,36	5 479	66,53
Kabupaten Pakpak Bharat	1 218,30	53 315	43,76

Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2022

### 2.3.3. Mobilitas Penduduk

Perubahan pola mobilitas, sangat tergantung pada perkembangan wilayah suatu Kabupaten/Kota. Jika wilayah-wilayah tersebut dapat mengembangkan pembangunannya, akan menjadi penarik bagi mobilitas penduduk. Pola mobilitas penduduk antar Kab/Kota maupun antar Kecamatan dapat dipelajari dari angka migrasi masuk, migrasi keluar dan migrasi netto. Migrasi penduduk antar desa-

kota merupakan perwujudan kebijakan pembangunan dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi, khususnya industri dan jasa yang umumnya berlokasi di kota-kota besar. Mobilitas penduduk sirkuler atau mobilitas penduduk nonpermanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan.

Adapun perilaku Mobilitas Penduduk sebagai berikut :

- Pilihan tempat terdekat dan tempat teman atau sanak saudara.
- Kemungkinan dapat pekerjaan/pendapatan yang lebih baik
- Bencana alam, peperangan, atau epidemik
- Semakin tinggi kekotaan seorang semakin tinggi mobilitasnya.
- Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitasnya.

Ada dua hal penting yang menyebabkan terjadinya mobilitas yakni daya dorong daerah asal biasanya desa dan daya tarik daerah tujuan biasanya kota. Beberapa penyebab penduduk desa melakukan migrasi ke kota atau yang sering disebut daya dorong desa, antara lain sebagai berikut;

- Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan.
- Semakin sempitnya lahan pertanian.
- Keberhasilan pertanian yang tidak pasti seperti paceklik, kekeringan, dan serangan hama.
- Minimnya fasilitas sosial di pedesaan.
- Kehidupan desa yang tidak bervariasi atau monoton.

Sementara yang menjadi penyebab penduduk pindah ke kota disebabkan adanya daya tarik kota di antaranya adalah:

- Lapangan pekerjaan di kota lebih banyak dibanding di desa.
- Upah pekerja di kota lebih tinggi dibanding di desa.
- Fasilitas sosial, pendidikan, olahraga, dan lain-lain lebih lengkap dibanding di desa.

Mobilitas penduduk di Kabupaten Pakpak Bharat dapat ditandai dengan jumlah penduduk yang masuk ( Migrasi In ) dengan jumlah penduduk yang pindah keluar ( Migrasi Out ), yang sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 jumlah penduduk yang pindah keluar dibandingkan dengan penduduk yang pindah masuk yang semakin mengecil sehingga pada tahun 2021 terjadi perubahan dimana penduduk yang keluar lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang masuk sehingga terjadi migrasi netto yang minus.

Pada tahun 2017 migrasi in sebanyak 1.025 jiwa sedangkan yang migrasi out sebanyak

386 jiwa sehingga migrasi netto nya menjadi sebanyak 386 jiwa, demikian pula pada tahun 2018 terjadi penduduk yang migrasi In sebanyak 1.208 jiwa dan yang migrasi out nya sebanyak 677 jiwa sehingga terjadi migrasi netto nya sebanyak 531 jiwa, pada tahun 2019 terdapat migrasi In sebanyak 1.685 jiwa sedangkan migrasi out nya sebanyak 1.277 jiwa sehingga terdapat migrasi netto nya sebanyak 408 jiwa, selanjutnya pada tahun 2020 terjadi penduduk yang pindah masuk atau migrasi in sebanyak 1.674 jiwa sedangkan penduduk yang pindah keluar atau migrasi out sebanyak 1.250 jiwa sehingga jumlah migrasi netto nya sebanyak 424 jiwa, dan terakhir pada tahun 2021 terdapat sebanyak 1.364 jiwa penduduk yang masuk (migrasi in) dan sebanyak 1.392 jiwa penduduk yang keluar (migrasi out) sehingga terjadi migrasi netto minus sebanyak 28 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa mulai tahun 2021 sudah mulai terjadi perubahan pola mobilitas penduduk dari sebelumnya terjadi perpindahan penduduk yang masuk lebih banyak menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang keluar atau jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada maka terjadi migrasi netto sebesar (-) 0,05 %.

Tabel 2.3.3. Jumlah Migrasi In, Migrasi Out dan Migrasi Netto Tahun 2017-2020 Kabupaten Pakpak Bharat

No	Parameter	Jumlah Migrasi In dan Out serta Migrasi Netto				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Migrasi In	1.025	1.208	1.685	1.674	1.364
2	Migrasi Out	386	677	1.277	1.250	1.392
3	Migrasi Netto	639	531	408	424	(-) 28

**2.4.**  
**Pemb**  
**angu**  
**nan**  
**Keluarga**

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Pakpak Bharat, Tim Penyusun GDPK

Keluarga merupakan institusi terkecil setelah institusi pada level RT/ RW, lingkungan/dusun, kelurahan/desa sebagai wahana tempat bersosialisasi seluruh anggota keluarga dalam membangun dan meningkatkan kualitasnya. Keluarga yang berkualitas adalah sebagai salah satu tujuan pembangunan kependudukan untuk

mencapai penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas .

Kondisi keluarga di kabupaten Pakpak Bharat dapat dilihat dari berbagai indikator pembangunan keluarga dan indikator pembangunan kualitas manusia lainnya, diantaranya adalah :

#### 2.4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran utama atas keberhasilan pembangunan kualitas penduduk yang mencerminkan juga sejauhmana tingkat kualitas keluarga dari hasil pembangunan dilakukan pada aspek atau pilar Pembangunan Keluarga. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2021 masih dibawah kondisi IPM Provinsi Sumatera Utara yakni 67,94 dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Utara yang sudah mencapai 71,77 walaupun demikian telah terjadi peningkatan sejak tahun 2017 sebesar 66,25 dimana rata rata Provinsi saat itu (tahun 2017) sebesar 70,0 kemudian naik menjadi 66,63 pada tahun 2018, seterusnya naik menjadi 67,47 pada tahun 2019, dan naik lagi menjadi 67,59 pada tahun 2020, kemudian terjadi kenaikan lagi pada tahun 2021 menjadi 67,94.

##### 2.4.1.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pakpak Bharat	66,25	66,63	67,47	67,59	67,94
2	Sumatera Utara	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2022

#### 2.4.2. Indeks Pembangunan Keluarga

Dalam hal melihat perkembangan keberhasilan Pembangunan Keluarga dilakukan dengan menghitung indeks terhadap variabel-variabel pembangunan keluarga yang komponen utamanya meliputi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, berkembang serta memandirian keluarga disamping itu juga Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman,

kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia serta merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga.

Adapun Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada tahun 2021 Kabupaten Pakpak Bharat adalah 51,72 berada dibawah rata rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 52,82 dan termasuk yang terendah di antara Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, dengan Indeks pada dimenesi Ketenteraman sebesar 53,03, pada dimensi Kemandirian sebesar 49,93 serta indeks pada Dimensi Kebahagiaan sebesar 52,2. Indeks pada dimensi kemandirian masih cukup rendah yang diperkirakan masih terdapatnya beberapa indikator yang belum terpenuhi oleh Kepala Keluarga dalam rangka meningkatkan keluarga yang mandiri seperti, belum memiliki sumber penghasilan, atau belum mampu menyediakan makanan dengan menu yang beraneka ragam, atau belum memiliki tabungan, belum memiliki atau menempati rumah yang layak huni, atau belum mampu mendapatkan pelayanan ke tempat atau tenaga pelayanan kesehatan jika mengalami sakit atau juga masih ada anak 7-18 tahun yang tidak bersekolah, maupun belum mampu mengakses media online.

Tabel 2.4.2. Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2021				
Kab/Kota/Provinsi	Indeks Ketenteraman	Indeks Kemandirian	Indkes Kebahagiaan	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)
Pakpak Bharat	53,03	49,93	52,2	51,72
Sumatera Utara	54,80	50,27	53,40	52,82
Sumber : BKKBN, Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021				

### 2.4.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021 sebanyak 4.790 jiwa atau 9,35 % dari jumlah penduduk yang ada, sedangkan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebanyak 1.343.860 jiwa atau 9,01 % dari

jumlah penduduk Sumatera Utara yang ada, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat hanya berkontribusi sebesar 0,4 % terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Utara.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata garis kemiskinan Sumatera Utara yakni hanya sebesar Rp. 332.644,- perbulan, sedangkan garis kemiskinan di Sumatera Utara sebesar Rp. 525.756,- perbulan.

**Tabel. 2.4.3. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan Perkapita/bln
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
Pakpak Bharat	4.790	9,35	1,05	0,2	332.644
Sumatera Utara	1.343.860	9,01	1,52	0,38	525.756

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2022

#### 2.4.4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang ditakar berdasarkan Indeks Pembangunan Manusi (IPM) antara laki-laki dan Perempuan maka Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebesar 99,02 pada tahun 2020 namun terjadi penurunan menjadi sebesar 98,89 pada tahun 2021

**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020 – 2021**

Kabupaten/Kota	IPM Laki-laki	IPM Perempuan	IPM (L+P)	IPG
----------------	---------------	---------------	-----------	-----

	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Pakpak Bharat	68,21	68,61	67,54	67,85	67,59	67,94	99,02	98,89
Prov. Sumatera Utara	75,91	76,14	68,83	69,08	71,77	72,00	90,67	90,73

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2022

## 2.5. Manajemen Data Base Kependudukan

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil). Sesuai amanat Undang-Undang, No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum, pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (*database*) kependudukan daerah dan nasional dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang pada gilirannya nanti akan dapat didayagunakan untuk kepentingan-kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan, sehingga akan terwujud pembangunan administrasi kependudukan berkelanjutan.

Kondisi saat ini, data dan informasi kependudukan belum tertata dengan baik, meskipun usaha untuk membangun Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) sebagai amanat UU No. 23 tahun 2006 telah dilaksanakan dalam mengembangkan *database* kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Adapun tujuan pengembangan manajemen database kependudukan adalah :

1. Memantapkan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
2. Menjadikan acuan bagi perencanaan pemerintah daerah dan pemanfaatan dunia bisnis,
3. Database Kependudukan Daerah yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan

4. Pelayanan prima administrasi kependudukan,
5. Mengembangkan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada.
6. Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep *Government to Government* (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau dikenai dengan istilah *Government to Citizen* (G2C), layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2006.
7. System Administrasi Kependudukan dapat memberikan layanan prima untuk mendukung hubungan sesama instansi pemerintah (G2G), hubungan kepada masyarakat (G2C) dan hubungan dengan dunia bisnis, atau dikenal dengan *Government to Business* (G2B). Pada periode ini, ditargetkan *database* kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah daerah dan nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan *marketing research*, *e-payment*, *e-commerce*, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.
8. Pemantapan fungsi dan peranan *Database* Kependudukan Daerah terintegrasi Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan. *Database* Kependudukan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemerintah, dunia bisnis, dan dunia internasional. *Database* Kependudukan Daerah telah memiliki tingkat kepercayaan (*trust*) yang tinggi dan diakui oleh dunia internasional. Kepercayaan yang tinggi terhadap *Database* Kependudukan Daerah dapat digunakan untuk mendukung kerjasama multilateral bidang pertahanan dan keamanan, seperti *cross border cybercrime*, bidang perekonomian (*international investment*), dan bidang lainnya, sehingga daerah memiliki daya saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan global.

Sebagai parameter, indikator data base maka penduduk harus memiliki:

- semua keluarga memiliki kartu keluarga
- semua keluarga melaporkan setiap kelahiran

- semua keluarga melaporkan setiap kematian \*
- semua keluarga melaporkan pindah keluar dan atau masuk
- semua penduduk usia 17 tahun keatas memiliki e ktp
- semua penduduk memiliki akte kelahiran dan akte kematian bagi penduduk mati
- semua penduduk memiliki akte nikah
- semua penduduk memiliki akte adopsi
- dan lain-lain

Realisasi penyediaan administrasi kependudukan di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2021 sebagai berikut ;

Realisasi penyediaan Kartu Tanda Pengenal (eKTP) sebanyak 85,6 % pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebanyak 87,9 %, kemudian sebanyak 89,8 % pada tahun 2019, dan menjadi 98,0 % pada tahun 2020, menjadi 97,7 % pada tahun 2021.

Realisasi Penerbitan Akte Kelahiran adalah sebanyak 88,3 % pada tahun 2017, 88,3 % pada tahun 2018, 88,1 % pada tahun 2019, 88,1 % pada tahun 2020 dan menjadi 88,0 % pada tahun 2021

Realisasi kepemilikan Kartu Keluarga dari sebanyak 100 % pada tahun 2017, 100 % pada tahun 2018, 100 % pada tahun 2019, 100 % pada tahun 2020 dan 100 % pada tahun 2021. Sedangkan capaian persentase penduduk yang memiliki Surat atau akte nikah adalah 36,4 % pada tahun 2017, sebanyak 43,6 % pada tahun 2018, sebanyak 53,1 % pada tahun 2019, 58,9 % pada tahun 2020 dan 61,9 % pada tahun 2021. (tabel 2.5.1. dibawah ini).

Tabel 2.5.1. Persentase Penduduk Yang Meliliki e KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Tahun 2017-2021

Parameter	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
% Penduduk Usia 17 Tahun keatas yang memiliki eKTP	85,6	87,9	89,8	98	97,7

% Penduduk yang memiliki akte kelahiran	88,3	88,3	88,1	88,1	88
% Keluarga yang memiliki kartu keluarga	100	100	100	100	100
% Penduduk Yg memiliki Surat/Akte Nikah	36,4	43,6	53,1	58,9	61,9
Total Persentase	77,58	79,95	82,75	86,25	86,9

Sumber Data : Dinas Dukcapil Kab. Pakpak Bharat/Tim Penyusun GDPK

### BAB III

## PROYEKSI DAN KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN

### 3.1. Proyeksi dan Target 2021-2045

Berdasarkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 1,38 % pertahun atau rata-rata rasio laju pertumbuhan penduduk sekitar sebesar 0,026 setiap tahunnya selama kurun waktu 10 tahun (2010-2020) dan jika diproyeksikan dengan menggunakan tehnik geomatriks setiap tahunnya diperkirakan akan terjadi penambahan penduduk pada tahun 2025 sebesar 59.532 jiwa, naik menjadi 67.690 jiwa pada tahun 2030, menjadi sebanyak 76.982 jiwa pada tahun 2035, dan sebanyak 87.541 jiwa pada tahun 2040 serta pada tahun 2045 menjadi sebanyak 99.549 jiwa, atau terjadi penambahan penduduk sebanyak 46.234 jiwa dari jumlah penduduk di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2021 sebanyak 53.315 jiwa.

Sedangkan kondisi yang diinginkan atau target tentang penambahan penduduk sampai dengan tahun 2045 dengan laju pertumbuhan 0,5 % maka diperkirakan jumlah penduduk akan menjadi sekitar 64.497 jiwa atau hanya bertambah sekitar 11.632 jiwa selama dua puluh lima tahun kedepan.

Jika dibandingkan dengan angka proyeksi diatas yang terjadi penambahan penduduk sekitar 46.234 jiwa maka terjadi pencegahan jumlah penduduk sekitar 34.602 jiwa selama dua puluh lima tahun, kondisi tersebut menggambarkan bahwa jika penatakelolaan pengendalian kuantitas penduduk dilakukan sama atau tidak ada peningkatan sama sekali sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2045 maka akan terjadi penambahan penduduk sekitar 46.234 jiwa, sedangkan jika dilakukan penatakelolaan pengendalian kuantitas penduduk secara terencana dibuat road mapnya, dilakukan dengan kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran yang tepat maka penambahan penduduk hanya sebanyak 11.632 jiwa dengan selisih penambahan penduduk sebanyak 34.602 jiwa.

**Tabel 3.1.1. Proyeksi dan Target Pertambahan Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2045**

Proyeksi/Target	Tahun					
	2021	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	53.315	59.532	67.697	76.982	87.541	99.549

Target/Kondisi Yang Diinginkan	53.315	61.417	61.910	62.906	64.430	64.947
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

### 3.2

Sumber : Diolah oleh Tim Penyusun GDPK

#### Dampak Kepadatan Penduduk

Salah satu dampak terhadap terjadinya pertumbuhan penduduk berdasarkan angka perhitungan proyeksi jumlah penduduk adalah akan terjadinya perubahan kepadatan penduduk terhadap luas lahan atau wilayah, dari luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 1.218,30 km persegi terjadi perubahan kepadatan penduduk dari 43,8 jiwa per km persegi pada tahun 2021 meningkat menjadi 48,9 jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2025, naik menjadi 55,6 jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2030, dan naik lagi menjadi 63,2 jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2035, seterusnya naik kembali menjadi 71,9 jiwa per km<sup>2</sup> di tahun 2040, terakhir meningkat menjadi 81,7 jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2045.

Jika diamati data berdasarkan angka proyeksi tersebut akan terjadinya peningkatan kepadatan penduduk ini terlihat sangat sederhana dan tidak memberikan dampak yang mengganggu terhadap daya tampung lahan atau lingkungan, sebab tergambar bahwa jumlah 81,7 per km<sup>2</sup> masih cukup jarang. Tetapi jika didalami secara lebih mendalam terutama dari aspek daya dukung lahan atau lingkungannya, maka ada hal hal yang perlu mendapatkan kajian lebih lanjut.

**Tabel 3.2.1. Proyeksi dan Target Kondisi Kepadatan Penduduk Tahun 2021 - 2045**

Tahun	2021	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	1.218,30	1.218,30	1.218,30	1.218,30	1.218,30	1.218,30
Jumlah Penduduk (Proyeksi)	53.315	59.532	67.697	76.982	87.541	99.549
Kepadatan Penduduk (Proyeksi)	43,8	48,9	55,6	63,2	71,9	81,7
Jumlah Penduduk (Target)	53.315	61.417	61.910	62.906	64.430	64947
Kepadatan Penduduk (Target)	43,8	50,4	50,8	51,6	52,9	53,3

Sumber Data Diolah oleh Tim Penyusun GDPK

#### 3.2.2. Dampak Ekologis

Para ahli lingkungan dan ekologi memandang bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap penduduk per tahunnya dibutuhkan minimal 1,25 ha dengan ukuran kebutuhan hidup penduduk standart Indonesia, standart hidup penduduk tersebut meliputi kebutuhan bahan makanan (food), perumahan (housing), transportasi

(transportation), barang-barang konsumsi (consumer goods) dan jasa-jasa (service). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan lahan dan energi, luas lahan terbangun, luas lahan kebun, luas lahan pertanian dan luas areal usaha perikanan. Hasil perhitungan merumuskan bahwa kebutuhan lahan per orang/tahun untuk pemenuhan kebutuhan ekologis penduduk kriteria gaya hidup masyarakat Indonesia, diperlukan lahan seluas 1,25 ha atau 12.500 m<sup>2</sup> perjiwa/tahun dan kebutuhan lahan per orang/tahun kriteria masyarakat dunia sebanyak 4,18 ha atau 41.800 m<sup>2</sup> pertahun. (Prof.Sudarto).

Tabel 3.3. dibawah merupakan simulasi salah satu dampak dari laju pertumbuhan penduduk yang terjadi terhadap daya dukung dan daya tampung lahan atau lingkungan yang mencerminkan bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Pakpak Bharat masih aman dari terjadinya krisis lahan sampai dengan tahun 2040. Mulai tahun 2045 terjadi kekurangan lahan sebanyak 2.606 ha yang artinya terjadi krisis kekurangan lahan di Kabupaten Pakpak Bharat yakni setiap penduduk hanya didukung oleh 1,22 ha persegi, dibawah standart kebutuhan hidup sebesar 1,25 ha persegi.

Tabel 3.3 : Perhitungan Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kebutuhan Ekologis Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 s.d 2045

Tahun	Jumlah Penduduk ( Jiwa )	Luas Wilayah (Ha)	Kebutuhan Lahan (1,25 ha/Jiwa)	Kekurangan Lahan (ha)
2021	53.315	121.830	66.644	55.186
2025	59.532	121.830	74.415	47.415
2030	67.697	121.830	84.621	37.209
2035	76.982	121.830	96.228	25.603
2040	87.541	121.830	109.426	12.404
2045	99.549	121.830	124.436	-2.606

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Penyusun GDPK

Berbagai dampak terhadap pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kabupaten Pakpak Bharat saat ini akan menambah sederetan masalah kependudukan dan masalah percepatan untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan. Bertitik tolak pada angka laju pertumbuhan penduduk 1,38 % pertahun periode 2010-2020, yang diproyeksikan pada tahun 2045 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat mencapai 99.549 jiwa, maka pertumbuhan penduduk seimbang tidak akan dapat dicapai apabila angka Total Fertility Rate (TFR) tidak diturunkan pada angka 2,1 atau 2,0 anak. Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kelahiran tinggi dan angka kematian menurun, akan membawa implikasi terhadap pembangunan pada sektor kesehatan, pendidikan, permukiman serta penyediaan bahan pangan dan sebagainya, mengharuskan penyiapan berbagai kebutuhan akses pelayanan yang dampaknya akan membutuhkan investasi serta pengalihan lahan untuk penyiapan infrastrukturnya serta dampak-dampak kerusakan lingkungan lainnya.

## BAB IV VISI, MISI DAN ISUE STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

### 4.1. Visi

Adapun Visi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat adalah :

***“ Membangun Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat yang Tumbuh Seimbang, Berkualitas, Maju, Berdaya Saing, Berkeadilan dan Sejahtera Tahun 2045 “***

### 4.2. MISI

Untuk mencapai Visi di atas maka disusun misi Pembangunan Kependudukan sebagai berikut :

1. Terciptanya penduduk yang berkualitas dan sejahtera melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Efisien, Efektif dan Mengutamakan Pelayanan Publik ;
2. Mempercepat pembangunan fasilitas umum dan Infrastruktur dalam mendukung tersedianya akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dengan tetap memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Menciptakan sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan untuk mencapai peningkatan sinergisitas dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat demi akselerasi pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat.
4. Tercapainya mobilitas penduduk yang seimbang untuk mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pembangunan infrastruktur pedesaan agar terciptanya suasana kehidupan perkotaan di pedesaan serta Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Budaya dan Potensi Lokal
5. Mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pembangunan kependudukan melalui pemanfaatan parameter dari data base dan informasi penduduk yang akurat dipercaya untuk mencapai pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan, Serta Menciptakan Dunia Usaha dan Investasi yang Adil dan Pro Rakyat

6. Membangun Keluarga berkualitas (tenteram, mandiri dan bahagia) serta memperkokoh pelestarian serta pengamalan Agama, Pancasila serta budaya Kabupaten Pakpak Bharat

7. Mewujudkan migrasi penduduk yang terarah, tertib, teratur, dan terlindungi

Visi dan Misi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 - 2045 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan kependudukan yang secara sistematis bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat dengan tetap memanfaatkan berbagai potensi yang ada berupa kekuatan dan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman yang ada.

### **4.3. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman**

#### **4.3.1. Kekuatan**

1. Terdapat penduduk yang berada pada usia 0-14 tahun (penduduk usia muda) sebanyak 17.642 jiwa atau sekitar 33,2 % yang berpotensi menjadi SDM sebagai modal pembangunan dimasa yang akan datang. dan dengan penduduk yang berusia 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 33.158 jiwa atau sekitar 62,2 %, dengan Rasio Ketergantungan sebesar 60,1 %.
2. Telah terjadi peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 7-24 tahun sebesar 72,83 % dibandingkan dengan rata rata Provinsi hanya sebesar 68,01 % pada tahun 2021
3. Telah terjadi tren kenaikan Angka Harapan Hidup pada tahun 2017 sebesar 67,47 tahun naik menjadi 67,57 pada tahun 2018, menjadi 67,79 pada tahun 2019 dan kemudian naik menjadi 68,11 pada tahun 2020 dan sebesar 68,26 pada tahun 2021.
4. Persentase Pekerja di sektor manufaktur terjadi kenaikan sebesar 0,37 % pada tahun 2017 naik menjadi 12,28 % pada tahun 2021.
5. Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 43,8 jiwa per km persegi dibandingkan luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 1.218,30 km<sup>2</sup>, dan hampir merata di setiap kecamatan.
6. Budaya memiliki jumlah anak sedikit sudah mulai terwujud dengan gambaran penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) dari sebanyak 3,8 anak pada tahun 2017

menjadi 3,5 anak pada tahun 2021 dan dengan rata rata Usia Kawin Pertama 22,57 tahun.

7. Dari segi data base dan informasi kependudukan sudah memiliki berbagai sumber data baik dari catatan dan statistik administrasi kependudukan catatan sipil, hasil Sensus Penduduk, SDKI, Susenas, hasil pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara rutin/reguler, data mikro keluarga, serta hasil sensus, survei dan data statistik rutin sektor lainnya. Sedangkan cakupan realisasi catatan sipil penduduk sudah mencapai 86,9 %.
8. Dalam aspek dukungan lainnya adanya dukungan politis dan dukungan operasional dari semua pihak baik dari legislatif, pihak swasta dan berbagai lapisan masyarakat, telah memberikan perhatian, dorongan dan dukungan yang sangat besar dalam pembangunan kependudukan di Pakpak Bharat dengan dituangkannya kedalam RPJMD. serta adanya jaringan kelembagaan sampai tingkat lini lapangan dan partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan pembangunan kependudukan seperti PPKBD, Sub PPKBD serta kader PKK, kader KB dan lainnya.

#### **4.3.2. Kelemahan**

1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi sebesar 1,38 % pertahun mengakibatkan lambatnya kondisi penduduk tumbuh seimbang serta sulitnya untuk pencapaian serta mempertahankan lamanya waktu masa berlangsungnya bonus demografi di Pakpak Bharat yang ditandai dengan telah terjadinya angka ketergantungan yang masih sebesar 60,1 %.
2. Tingkat keberlangsungan dan efektifitas kesertaan ber KB yang sangat rendah baik peserta KB Aktif maupun peserta KB Baru sehingga tidak banyak pengaruhnya untuk menurunkan fertilitas yang berada pada 3,5 anak,
3. Banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan di tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi, serta masih rendahnya minat dan perhatian untuk mengembangkan pendidikan vokasional.
4. Perilaku hidup bersih dan sehat penduduk yang relatif masih rendah dalam menjaga serta memelihara kesehatan keluarganya, memeriksakan ibu hamil, memeriksakan bayi serta pemberian gizi, imunisasi dll serta lingkungan yang

sehat, merokok disembarangan tempat termasuk pengolahan limbah atau sampah sehingga prevalensi anak stunting cukup tinggi.

5. Kecenderungan Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang lebih memperhatikan pelayanan kuratif dari pada pelayanan preventif seperti pelayanan konseling pra nikah, pelayanan pemeriksaan ibu hamil, pelayanan bayi berupa asupan gizi, ibu menyusui dll.
6. Penataan Migrasi In dan Migrasi Out sehingga terjadinya migrasi netto yang minus setiap tahunnya mulai tahun 2021.
7. Masih belum tercapainya sistem administrasi kependudukan serta pemanfaatan data untuk dijadikan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.
8. Belum bersinergi dan terintegrasinya berbagai kebijakan dan program pembangunan diantara Pemangku Kebijakan Pembangunan Kependudukan ( Pengendalian Kuantitas, Pengembangan Kualitas, Penataan Mobilitas, Pembangunan Keluarga dan Data Base Penduduk )
9. Keterbatasan kuantitas dan kualitas tenaga Penyelenggara Pembangunan kependudukan baik dalam aspek pengendalian kuantitas penduduk ( tenaga lapangan KB, kader KB ), aspek kualitas penduduk ( tenaga medis, guru ), tenaga lainnya seperti tenaga pencacah administrasi penduduk dan sebagainya

#### **4.3.3. Peluang**

1. Semakin jelas kewenangan serta pembagian urusan sehingga menjadikan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nasional menjadi salah satu urusan wajib bagi daerah kabupaten/kota serta adanya kelembagaan tersendiri (OPD) dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Komitmen politis dan operasional Pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB menjadi bagian dari Prioritas nasional maupun daerah yang dituangkan dalam RPJMN dan RPJMD serta berbagai dokumen perencanaan nasional maupun daerah.
3. Pembiayaan yang tersedia baik APBN, APBD, APBDes serta berbagai sumber keuangan masyarakat yang dapat menjadikan Program Pembangunan Kependudukan semakin baik.

4. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang mendukung upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta menekankan kembali peran dan fungsi keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk dan keluarga melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, status kesehatan, serta pendapatan keluarga.
5. Sikap dan perilaku yang kondusif masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya pemerintah memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraannya, terutama dalam memberikan peran dan kedudukan perempuan sebagai mitra sejajar kaum pria dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi maupun budaya.
6. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pengembangan dalam memberikan peluang bagi upaya-upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi serta mutu pelayanan pembangunan kependudukan.
7. Perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang mempermudah penyediaan dan akses data base dan informasi, pengembangan jaringan informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya, termasuk penyediaan data mikro keluarga bersekala nasional. Disamping itu, pengembangan teknologi tepat guna yang mampu menyediakan perangkat yang dibutuhkan bagi pembangunan berwawasan kependudukan.
8. Dukungan dan partisipasi para mitra kerja yang semakin meningkat dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kependudukan serta sumbangan pemikiran dan kajian ilmiah dari Universitas/ Perguruan Negeri maupun swasta para Tokoh Lintas Agama dan para Stakeholders lainnya.
9. Partisipasi pusat pusat pelatihan dan penelitian berbagai program dalam Pembangunan Kependudukan, Dukungan komitmen Internasional, yaitu adanya dan disetujuinya oleh Pemerintah Indonesia berbagai komitmen dan kesepakatan internasional seperti ICPD Cairo tahun 1994, dan SDGs yg memberikan dasar kerjasama upaya global utk meningkatkan kualitas dan hak-hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, kesetaraan Gender, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

#### **4.3.4. Ancaman**

1. Budaya dan kebiasaan yang berlaku yang mempengaruhi kelambatan penurunan fertilitas yang disebabkan adanya keinginan yang kuat terhadap jumlah anak ideal yang lebih dari dua anak.
2. Belum kuatnya sinergisitas dan kolaborasi dalam peningkatan kualitas penduduk khususnya aspek pendidikan yang belum adanya keserasian dalam pengintegrasian kebijakan dan program pembangunan pendidikan nasional dari tingkat pusat, provinsi dan daerah kab/kota. Demikian pula dalam aspek pembangunan kesehatan serta pembangunan dalam bidang perekonomian yang belum saling mendukung dan terintegrasi.
3. Belum adanya rencana penataan mobilitas dan pengendalian kepadatan serta persebaran penduduk yang belum selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka menciptakan pembangunan yang berwawasan penduduk.
4. Ketahanan keluarga dalam menghadapi kecepatan perkembangan dan kemajuan global sehingga jika tidak diberdayakan secara dini dan baik akan menjadikan keluarga- keluarga semakin rentan untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan fungsi keluarganya serta semakin meningkatnya keluarga yang tidak memiliki tabungan.
5. Kondisi perekonomian dunia yang memburuk termasuk dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi covid 19 serta ketidak mampuan dunia mengatasi persoalan persoalan serta dampak ekonomi global tersebut membuat rendahnya pendapatan perkapita dan pengeluaran penduduk sehingga tingkat kesejahteraan penduduk semakin menurun, lambatnya penurunan angka kemiskinan, serta mulai terjadinya gejala dampak dari kemajuan yang pesat dalam bidang industri teknologi yang dewasa ini terjadinya revolusi industri 4,0
6. Pengaruh globalisasi dan informasi dewasa ini, serta tumbuhnya nilai-nilai baru dalam pelaksanaan demokrasi dan penegakan hak-hak azasi manusia, menimbulkan pula tantangan baru dalam upaya memberikan pelayanan yang harus semakin berkualitas, dan meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan dan hak-hak penduduk, serta semakin derasnya arus informasi dan globalisasi akan berdampak pula terhadap masuknya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa, yang akan mengancam ketahanan keluarga.

#### **4.4. Isu Strategis**

Mengacu kepada data tentang kondisi saat ini serta analisa berbagai kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang ada dalam kelima pilar pembangunan kependudukan maka adapun isu strategis yang dapat di tarik dalam Pembangunan Kependudukan saat ini dan waktu mendatang di Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ) yang masih cukup tinggi yakni 1,38 % sehingga sulit untuk menciptakan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) menuju Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP)
2. Kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) ber KB yang kurang berkualitas atau kurang memiliki tingkat kelangsungan dan efektifitas yang tinggi.
3. Rasio Ketergantungan yang masih mencapai 60,1 % dengan jumlah kelompok penduduk usia muda dan produktif yang tinggi akan memberikan peluang untuk mendapatkan bonus demografi.
4. Belum maksimalnya kolaborasi institusi pendidikan dengan institusi ketenagakerjaan, pelaku ekonomi (perkebunan, industri dll) untuk menciptakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang terampil, profesional dalam bekerja dan berusaha.
5. Penurunan angka kematian dan kesakitan yang belum maksimal untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang antara fertilitas dan mortalitas.
6. Belum dikelola secara maksimal pusat pusat pelayanan kesehatan masyarakat ke arah yang proporsional dan profesional antara pelayanan preventif atau promotif dengan pelayanan kuratif, dalam rangka menggerakkan perilaku hidup bersih dan sehat.
7. Infrastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum maksimal untuk memenuhi kecukupan dan kualitas pelayanan kesehatan maupun pendidikan penduduk.
8. Penatakelolaan ketenagakerjaan yang belum maksimal dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan, tenaga kerja yang profesional, trampil, mandiri, berdaya saing, kreatif serta memiliki produktifitas yang tinggi dalam berbagai jenis usaha.
9. Masih tingginya jumlah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak ditandai dengan Indeks Pembangunan Keluarga (I

Bangga) yang masih rendah

10. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,36 % yang sudah sangat kecil tetapi kurang berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan yang masih tinggi 9,35 % mengharuskan dilakukan secara maksimal langkah langkah pemberdayaan kualitas penduduk angkatan kerja termasuk kelompok ibu -ibu mengurus rumah tangga yang jumlahnya cukup besar.
11. Belum maksimalnya penatakelolaan manajemen data base dan informasi kependudukan dengan melakukan pelayanan prima, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat.
12. Masih rendahnya penatakelolaan kepadatan, pemerataan, urban serta mobilitas (migrasi masuk dan migrasi keluar) untuk terjadinya keseimbangan daya dukung dan daya tampung lahan dan lingkungan.
13. Belum selarasnya kebijakan untuk mendukung visi bidang ekonomi pemerintah pusat pada usia RI ke 100 pada tahun 2045 menjadi negara ke 7-8 terbesar di dunia, yakni dengan pencapaian PDRB per kapita sebesar US\$ 46,900 pertahun
14. Tingkat produktifitas penduduk pekerja atau berusaha yang masih belum mampu menciptakan peningkatan aset penduduk sebagai tabungan dimasa tua.
15. Belum maksimal pengarahannya penduduk usia produktif dalam perluasan usaha pada bidang industri pengolahan dan manufaktur terutama bagi kelompok penduduk yang putus sekolah, pengangguran dan pekerja non formal, pekerja tidak tetap atau serabutan, pekerja tetap yang belum mendapatkan upah atau gaji.



## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Mengacu kepada data tentang kondisi saat ini dan analisa berbagai kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang ada serta visi, misi, isue strategis dalam kelima pilar pembangunan kependudukan maka adapun strategi dan kebijakan dalam Pembangunan Kependudukan saat ini dan waktu mendatang di Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

#### 5.1. Strategi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat

- 1) Mengendalikan kuantitas penduduk meliputi penurunan fertilitas dan mortalitas untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP)
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, bermoral, dan berbudaya, berperilaku hidup bersih dan sehat lahir dan batin, berpendidikan, kreatif, inovatif serta produktif.
- 3) Menciptakan lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, industri pengolahan (manufaktur) dan pembinaan Usaha Kecil Menengah Mikro dan industri rumah tangga.
- 4) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kemajuan Kabupaten Pakpak Bharat terutama infrastruktur yang mendukung percepatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk.
- 5) Menatakelola persebaran dan mobilitas penduduk untuk mencapai keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- 6) Menyiapkan keluarga yang berkualitas berketahanan dan mampu memobilisasi potensi sumber daya yang ada untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera.
- 7) Menatakelola data dan informasi penduduk yang update dan dipercaya terintegrasi serta mudah diakses sebagai pendukung sistem pengambilan keputusan.
- 8) Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang

berlaku.

- 9) Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan Narkoba dan tindak kriminal lainnya.
- 10) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok difabel.
- 11) Meningkatkan produktitas penduduk agar memiliki tabungan, tambahan aset sehingga dimasa hari tua dapat hidup mandiri.

## **5.2. Kebijakan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat.**

- 1) Penatakelolaan pengendalian kuantitas penduduk melalui penurunan tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ) yang masih cukup tinggi yakni 1,38 % menjadi 0,5 % pada tahun 2045 dalam rangka menciptakan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) menuju Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP)
- 2) Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) yang masih tinggi 3,5 anak melalui peningkatan kesertaan PUS ber KB (CPR) yang berkualitas atau memiliki tingkat kelangsungan dan efektifitas yang tinggi dengan penajaman sasaran terhadap PUS muda paritas rendah serta meningkatkan Usia Kawin Pertama penduduk perempuan.
- 3) Mempersiapkan kualitas penduduk usia muda (produktif dan penduduk usia dini) yang kreatif, inovatif dan produktif melalui peningkatan partisipasi penduduk usia sekolah mulai dari PAUD sampai ke jenjang pendidikan tinggi, serta pendidikan vokasional atau kejuruan.
- 4) Kolaborasi institusi pendidikan dengan institusi ketenagakerjaan, pelaku ekonomi (perkebunan, industri dll) untuk menciptakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang terampil, profesional dalam bekerja dan berusaha.
- 5) Penurunan angka kematian dan kesakitan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang antara fertilitas dan mortalitas melalui penatakelolaan pusat pusat pelayanan kesehatan masyarakat ke arah pelayanan preventif atau promotif yang seimbang dengan pelayanan kuratif, dalam rangka menggerakkan perilaku hidup

bersih dan sehat.

- 6) Penatakelolaan infrastruktur pelayanan kesehatan yang cukup dan berkualitas melalui mobilisasi dan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta serta institusi pendidikan kesehatan masyarakat, kedokteran, kefarmasian dan organisasi profesi lainnya.
- 7) Penatakelolaan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan, tenaga kerja yang profesional, trampil, mandiri, berdaya saing, kreatif serta memiliki produktifitas yang tinggi dalam berbagai jenis usaha.
- 8) Membangun Keluarga yang berkualitas dan mampu menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga serta menurunkan jumlah keluarga yang tergolong belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sekaligus mengurangi berbagai jenis penyakit sosial masyarakat melalui peningkatan kerjasama dan kegotongroyongan berbagai pihak.
- 9) Memperkecil kesenjangan ekonomi penduduk dengan pengurangan tingkat kemiskinan melalui pemberdayaan desa membangun, pemanfaatan dan pengembangan potensi desa berupa sumber daya alam dan sumber daya manusianya, menciptakan desa desa mandiri dan kampung-kampung berkualitas, menumbuhkan suasana kehidupan perkotaan (urban) di desa-desa atau membangun sebanyak mungkin kota-kota baru.
- 10) Meningkatkan partisipasi penduduk perempuan terutama kelompok angkatan kerja yang berstatus ibu rumah tangga ( hanya mengurus rumah tangga ) dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga melalui pengembangan berbagai usaha industri rumah tangga dan industri ekonomi kreatif.
- 11) Penatakelolaan manajemen data base dan informasi kependudukan yang tertib administratif dengan melakukan pelayanan prima, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat.
- 12) Penatakelolaan kepadatan, pemerataan, urban serta mobilitas ( migrasi masuk dan migrasi keluar) untuk terjadinya keseimbangan daya dukung dan daya tampung lahan dan lingkungan melalui kajian-kajian akademis, intensifikasi pemanfaatan lahan dan pelestarian ekosistem, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

- 13) Menyelaraskan kebijakan untuk mendukung visi bidang ekonomi pemerintah pusat pada usia RI ke 100 pada tahun 2045 menjadi negara ke 7-8 terbesar di dunia, yakni dengan pencapaian PDRB per kapita sebesar US\$ 46,900 pertahun melalui penataan ulang rencana dan capaian-capaian serta program terhadap sumber-sumber pendapatan dan penghasilan penduduk dari berbagai sektor pembangunan ekonomi.
- 14) Meningkatkan produktifitas penduduk melalui penatalaksanaan sistem pengupahan, pengaturan dan pengawasan harga hasil pertanian dan perkebunan penduduk (petani rakyat dan nelayan)
- 15) Meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui perluasan usaha dalam bidang industri pengolahan dan manufaktur terutama bagi kelompok penduduk yang putus sekolah, pengangguran dan pekerja non formal, pekerja tidak tetap atau serabutan, pekerja tetap yang belum mendapatkan upah atau gaji dan pekerja yang berpenghasilan rendah.

## **BAB VI**

### **ROADMAP KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN DAN POKOK-POKOK PROGRAM**

Pembangunan Kependudukan yang di desain untuk menjadi acuan pembangunan kependudukan secara operasional untuk setiap periode atau tahapan 5 tahunan perlu disusun suatu peta jalan (road map) yang mencakup tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program yang perlu dilakukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan kependudukan ke depan.

Road Map Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat mencakup kurun waktu 2021 sampai dengan 2045 dengan periode lima tahunan. Road Map dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pembangunan kependudukan telah dapat dicapai, baik yang mencakup pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan

kualitas penduduk, penataan persebaran, dan pengaturan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan penataan manajemen data base dan informasi kependudukan.

**5.1. Road-map Pengendalian Kuantitas Penduduk yang diinginkan dan Pokok-Pokok Program Pembangunan**

**1. Roadmap Kondisi Kuantitas Penduduk Diinginkan dan Pokok-Pokok Program Pembangunan**

<b>ROADMAP 2021-2025</b>	<b>ROADMAP 2026-2030</b>	<b>ROADMAP 2031-2035</b>	<b>ROADMAP 2036-2040</b>	<b>ROADMAP 2041-2045</b>
Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan jumlah dan laju yang semakin kecil	Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan jumlah dan laju yang semakin kecil	Tercapainya kondisi penduduk dengan jumlah, laju pertumbuhan struktur umur dan sex rasio yang menandai terjadinya penduduk tumbuh seimbang (PTS)	Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang sebagai prasyarat tercapainya kondisi penduduk tanpa pertumbuhan (PTP)	Terkendalinya kondisi penduduk tumbuh seimbang dan tercapainya kondisi penduduk tanpa pertumbuhan (PTP)

**Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pengendalian Kuantitas**

## Penduduk

Indikator/ Parameter	Periode Roadmap 2021-2045					
	2021	2025	2031	2035	2041	2045
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,38	1,20	1,10	0,90	0,6	0,5
Total Fertility Rate (anak)	3,5	3,0	2,7	2,5	2,3	2,1
Persentase Peserta KB Aktif	74,2	74,4	74,6	74,8	75,0	75,0
Usia Kawin Pertama bg Wanita	22,57	22,75	22,80	22,85	25,95	23,0
Unmetneed (%)	19,79	17,0	15,0	13,0	11,0	10,0

Dalam jangka panjang, kondisi kuantitas penduduk yang diinginkan adalah tercapainya jumlah penduduk yang stabil dan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Untuk mencapai kondisi ini, jumlah kelahiran bayi seimbang dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Indikator pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,0 per perempuan atau Net Reproduction Rate (Angka Reproduksi Bersih - NRR) sebesar 1 perempuan. Dalam Grand Design ini TFR 2,5 anak diperkirakan tercapai pada tahun 2035 dan akan turun sampai 2,1 anak pada tahun 2045, agar angka beban ketergantungan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021 yang sudah mencapai 60,1.% dapat turun dan dipertahankan dalam kurun waktu lama sehingga tercapainya pemanfaatan bonus demografi sebagai jendela peluang (*windows of opportunity*) agar menjadi landasan pemicu pertumbuhan ekonomi yang hanya sekali dalam sejarah dan waktunya cukup pendek.

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas, Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program KB yang mengatur :

1. Usia ideal wanita melakukan perkawinan pertama pada umur 20 tahun.
2. Usia ideal melahirkan anak pertama bagi seorang ibu pada umur 21 tahun
3. Jarak ideal melahirkan anak selama 5 tahun untuk menghindari 2 Balita dalam satu periode
4. Jumlah ideal anak yang dilahirkan sebanyak 2 orang anak

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program KB pada hakekatnya dilaksanakan untuk

membantu pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan hak berikut :

1. Hak dalam melakukan pengaturan kehamilan yang diinginkan
2. Hak untuk mengikuti Program Keluarga Berencana secara sukarela
3. Hak untuk mendapatkan informasi dan promosi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
4. Hak untuk mendapatkan Pelayanan Kontrasepsi yang mudah, murah diakses serta berkualitas
5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan keikutsertaan atau peranserta masyarakat dalam pelayanan KB secara mandiri
6. Hak untuk mendapatkan ketersediaan dan peningkatan kualitas terhadap kesertaan KB bagi Pria
7. Hak untuk mendapatkan kualitas terhadap kesertaan ber KB bagi Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah ( jumlah anak sedikit yakni satu atau dua anak ).

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan kematian suatu upaya penurunan angka kematian ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan kematian ibu pasca melahirkan serta penurunan angka kematian bayi dan anak. Pengendalian angka kelahiran sangat penting, maka diperlukan revitalisasi program KB di Kabupaten Pakpak Bharat berorientasi kearah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( Bangsa Kencana ). Strategi yang dikembangkan adalah melakukan integrasi, desentralisasi, kemitraan dan pemberdayaan serta fokus pada penduduk miskin.

Pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, demografi dan ekonomi kelompok sasaran. Keberhasilan Pembangunan Kependudukan dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup selama ini telah menghasilkan transisi demografi. Transisi tersebut ditandai oleh turunnya angka kelahiran, angka kematian dan disertai peningkatan usia harapan hidup.

Semua program pokok serta kegiatan-kegiatan utama dari pilar pengendalian kuantitas penduduk ini yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah harus tetap mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang ditentukan oleh pemerintah dalam system perencanaan

pembangunan daerah, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri No, 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenkelatur Dan Perencanaan dan Keuangan Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Program pengendalian Penduduk, meliputi Pemaduan dan Sinkronisasi Kegiatan, Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Terhadap Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB, Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan, Penyusunan dan Pemanfaat Survei, Pendataan dan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan, Penguatan Kerjasama, Penyediaan dan Pengembangan Materi, Advokasi, Sosialisasi, Fasilitasi serta Implementasi Pendidikan Kependudukan, Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa serta kajian-kajian Sistem Pencatatan dan Pelaporan, Pendataan Keluarga serta lainnya.
  
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana meliputi ; Pelaksanaan Advokasi dan KIE, Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dn Media Luar Ruang, Pelaksannanan Operasional Program KKBPK, Rapat Koordinasi berbagai tingkat mulai dari Kab/Kota, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan Promosi dan KIE sesuai dengan kearifan lokal, Pendayagunaan dan Pembinaan Penyediaan Sarana Pendukung, Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Petugas Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

**5.2. Road Map Peningkatan Kualitas Penduduk yang diinginkan dan Pokok-Pokok Proram Pembangunan**

<b>Gambar 5.2.3. Road Map Peningkatan Kualitas Penduduk yang diinginkan dan pokok-pokok program pembangunan</b>				
<b>ROADMAP 2021-2025</b>	<b>ROADMAP 2026-2030</b>	<b>ROADMAP 2031-2035</b>	<b>ROADMAP 2036-2040</b>	<b>ROADMAP 2041-2045</b>

Pencapaian Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Penduduk yang Mandiri, Maju dan Sejahtera	Peningkatan kualitas Pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang mapan	Pencapaian kualitas penduduk kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif	Meningkatkan Pencapaian kualitas penduduk kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif	Terwujudnya kualitas penduduk yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan serta bermartabat
---	---	--	---	---

**Gambar. 5.2. 4. Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk**

Indikator/Parameter	Periode Road Map					
	2021	2025	2030	2035	2040	2045
<b><u>Pendidikan</u></b>						
- Rata2 Lama sekolah (thn)	9,14	11,0	12,0	13,5	15,0	16,0
- Harapan Lama Sekolah (thn)	13,87	15,0	16,0	17,0	18,0	18,0
- Angka Partisipasi sekolah Tingkat pendidikan penduduk usia 7-24 thn (%)	72,83	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0
<b><u>Kesehatan</u></b>						
- Angka Kematian Bayi per 1000 blh	0,11	0,07	0,05	0,03	0,01	0,01
- Angka Harapan Hidup (thn)	65,96	68,0	70,0	72,0	74,0	74,0
- Prevalensi Stunting (%)	21,8	14,0	10,0	8,0	6,0	5,0
<b><u>Ekonomi</u></b>						
-PDRB perkapita ADHK (juta rupiah/th)	23.834	32.180	43.440	58.645	79.170	106.900
-Pengeluaran perkapita (ribu rupiah/bln)	973, 9	1.314	1,779	2,401	3,241	4,375

- % Penduduk Bekerja di Manufaktur	12,28	15,0	17,0	20,0	25,0	30,0
- Gini Rasio	<b>0,242</b>	<b>0,235</b>	<b>0,230</b>	<b>0,220</b>	<b>0,215</b>	<b>0,211</b>
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<b>67,94</b>	<b>71,0</b>	<b>74,0</b>	<b>77,0</b>	<b>80,0</b>	<b>81,0</b>

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktifitas, tingkat sosiai, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian dan berkebangsaan dan hidup layak.

Ada tiga aspek landasan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas penduduk, yang pertama : dimensi pendidikan yang dapat berkompetisi melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas, kedua ; meningkatkan derajat kesehatan penduduk, dan ketiga : dimensi kesejahteraan, yakni meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan PDRB perkapita, pengurangan pengangguran, memperkecil kesenjangan ekonomi sebagai salah satu nya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat,

Strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan, selain itu strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan bagian integral dari strategi pengendalian kuantitas penduduk, Pembangunan Keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk.

Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dibuat adalah memberikan akses sebesar-besarnya kepada kelompok rentan khususnya keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan. Penurunan *gender gap* juga sebagai prioritas untuk mengakses terhadap pelayanan pendidikan, khususnya untuk mengatasi masalah kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan sehingga angka partisipasi sekolah penduduk disetiap jenjang pendidikan semakin meningkat terutama angka partisipasi sekolah usia 7-24 tahun dari 72,83 % kondisi tahun 2021 menjadi 82 % pada tahun 2045, rata-rata lama sekolah dari 9,14 tahun menjadi 16 tahun, harapan lama sekolah dari 13,87 tahun menjadi 18 tahun pada tahun 2045.

Beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut :

### 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Targetnya meningkatkan APK/APM/Melek huruf serta meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah pada setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan memberikan kesempatan pada semua penduduk usia pra sekolah, baik umum, kejuruan, keagamaan maupun pendidikan khusus, serta memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

### 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Targetnya adalah meningkatkan mutu kurikulum pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sehingga memberikan dukungan yang berarti bagi bakat kehidupan peserta didik dimasa depan, Dengan penyiapan berbagai fasilitas dan melakukan pemetaan serta kesejahteraan guru mengembangkan dan meningkatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) vokasional..

### 3. Peningkatan Manajemen

Targetnya adalah meningkatkan kemampuan pengelolaan program pembangunan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang meliputi pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan prasarana yang mendukung proses edukasi.

### 4. Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

Targetnya adalah menciptakan proses perencanaan pembangunan pendidikan lebih partisipatif, terkoordinasi dan lebih menyeluruh terhadap jalur, jenis dan kelembagaan satuan pendidikan.

### 5. Peningkatan Prasarana Masyarakat, dunia Perusahaan dan stakeholder.

Targetnya diarahkan pada kebersamaan memiliki tanggungjawab antara pemerintah, masyarakat dan peran serta didik sebagai bagian dari subjek pembelajaran yang dinamis, adaptif dan penuh kreatif, inisiatif untuk mengembangkan inovasi-inovasi pendidikan.

Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian meternal. Strategi utama adalah melakukan pencegahan dan tretment penyakit infeksi, khususnya pada bayi, dan anak-anak.

Strategi penurunan kematian meternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal Hal tersebut harus di topang dengan pengembangan pelayanan prenatal maupun antenatal.

Disamping itu strategi dalam upaya pencegahan penyakit (preventifi) harus semakin ditingkatkan sehingga berdampak atas terjadinya kondisi penurunan dalam bidang pelayanan kuratif, untuk itu diperlukan upaya :

1. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang cukup dan murah serta berkualitas serta melakukan pengawasan obat dan makanan
2. Upaya peningkatan kesehatan melalui promosi dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta melakukan pengawasan obat dan makanan
3. Upaya perbaikan gizi masyarakat untuk mendapatkan kecukupan gizi terutama ibu hamil dan balita agar penduduk memiliki ketahanan tubuh yang dapat bertahan dari berbagai penyakit dan virus, kondisi gizi buruk yang saat ini masih terjadi harus diturunkan secara masif hingga tidak terjadi lagi kasus adanya gizi buruk.
4. Melakukan upaya secara masif pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Stunting, khusus pencegahan terjadinya stunting yang saat ini berada pada kondisi prevalensi 21,8 % akan diturunkan 14 % pada tahun 2025 dan selanjutnya akan diperkecil hingga 5 % pada tahun 2045.
5. Sstandarisasi pelayanan kesehatan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS paru-paru/ RS mata dan menciptakan keunggulan masing masing fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, kesehatan lansia
7. Pengendalian kesehatan makanan serta pengembangan lingkungan sehat

.Kondisi ekonomi yang baik harus didukung dengan kestabilan dan pertumbuhan yang baik pula, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat mengalami pasang surut (*fluktuatif*) yang disebabkan oleh dampak eksternal serta dampak pandemi covid 19. Oleh karenanya langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang adalah meningkatkan potensi sektor perdagangan, manufaktur, jasa-jasa seperti jasa keuangan dan service, perhatian pada sektor ekonomi kreatif serta industri rumah tangga dan lain sebagainya terutama yang sangat memberikan dampak yang tinggi terhadap PDRB perkapita dan Pengeluaran perkapita.

Semakin tinggi nilai PDRB per kapita daerah Kabupaten Pakpak Bharat, maka semakin tinggi kemampuan dan kesejahteraan penduduk, PDRB per kapita penduduk Kabupaten Pakpak Bharat setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan yang cukup baik tetapi terjadi penurunan akibat dari Covid 19 dan krisis ekonomi global, yang perlu terus

dilakukan percepatan peningkatannya atau mempercepat dan penguatan pemulihannya melalui sektor yang sangat signifikan memberikan dampak laju pertumbuhannya khususnya lagi dalam mendukung perencanaan nasional yang pada usia RI yang 100 tahun atau tahun 2045 nanti Indonesia menjadi negara ke 7-8 termaju di dunia dari segi ekonomi dengan salah satu indikatornya PDRB perkapita pertahun sebesar US \$ 46.900.

Oleh sebab itu dalam dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan ini diupayakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan hingga mencapai sekitar 7 % pertahun sehingga pada tahun 2045 nanti PDRB perkapita mencapai lebih dari seratus juta rupiah perkapita pertahun, dengan peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk diatas empat puluh juta pertahun, serta penduduk yang bekerja di sektor manufaktur ditingkatkan menjadi 30 % pada tahun 2045.

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan pendapatan total, pendapatan perkapita dan pengeluaran perkapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur usaha ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan strategi :

1. Penumbuhan budaya senang bekerja keras dan persaingan yang sehat terutama bagi tenaga kerja muda
2. Pengembangan motivasi kreatifitas dan inovasi di kalangan angkatan kerja muda dan terdidik sehingga dapat menciptakan pekerjaan dari pada menanti pekerjaan dari sektor formal. sehingga tumbuh secara cepat jumlah penduduk usia kerja yang berkerja di sektor manufaktur, industri pengolahan ataupun pelaku usaha ekonomi kreatif
3. Peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. dengan demikian, Kabupaten Pakpak Bharat diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha.
4. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui sinergisitas dan kolaborasi antara pelaku ekonomi yang membutuhkan tenaga kerja dengan sektor pendidikan terutama sekolah sekolah kejuruan (vokasional) dan perguruan tinggi
5. Peningkatan partisipasi penduduk perempuan dalam usaha mikro terutama peningkatan pendapatan keluarga berupa industri rumah tangga,

Semua program pokok serta kegiatan-kegiatan utama dari pilar peningkatan kualitas penduduk ini yang meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi (kesejahteraan) yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah harus tetap mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang

ditentukan oleh pemerintah dalam system perencanaan pembangunan daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenkelatur Dan Perencanaan dan Keuangan Daerah terdiri dari antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendidikan meliputi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan,
2. Program Pengembangan Kurikulum, Meliputi Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,
3. Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan meliputi, Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKP dan UKM, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor.
6. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif
7. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)
8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.
9. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
10. Program Penyuluhan Pertanian melalui Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
11. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melalui Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan

### **5.3. Roadmap Penataan Pesebaran dan Mobilitas Penduduk yang diinginkan dan Pokok-Pokok Program Pembangunan**

**Gambar 5.3. 5. Roadmap Penataan Pesebaran dan Mobilitas Penduduk yang diinginkan dan Pokok-Pokok Program Pembangunan**

ROADMAP 2021-2025	ROADMAP ROADMAP 2026-2030 2026-2030	ROADMAP ROADMAP 2031-2035 2031-2035	ROADMAP ROADMAP 2036-2040 2036-2040	ROADMAP ROADMAP 2041-2045 2041-2045
Penataan Persebaran penduduk antar daerah/kecamatan dalam kabupaten	Penataan Persebaran penduduk antar daerah dalam kabupaten sesuai daya dukung sosial dan lingkungan	Penataan Persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga	Terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar wilayah sehingga konsentrasi penduduk terkendali dan keseimbangan antara migrasi In dengan migrasi Out	Terkendalinya persebaran penduduk yang lebih merata antar wilayah sehingga konsentrasi penduduk terkendali dan keseimbangan antara migrasi In dengan migrasi Out

**Gambar 5.3,6. Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Penataan Persebaran Dan Mobilitas Penduduk**

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2021-2045					
	2021	2025	2030	2035	2040	2045
Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	43,76	47,10	50,68	54,53	58,67	63,13
Migrasi Neto (%)	(-) 0,05	(-) 0,04	(-) 0,03	(-) 0,02	(-) 0,01	0
% Pertumbuhan Penduduk Perkotaan (Urban)	6,65	8,66	10,65	14,63	17,62	21,0

Menyangkut aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar daerah kecamatan sehingga konsentrasi penduduk terkendali. Demikian juga dengan urbanisasi, diharapkan penduduk dari kecamatan yang jarang penduduknya jangan berbondong-bondong datang ke perkotaan yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru yang tidak kalah peliknya, tetapi yang

perlu diciptakan adalah kondisi masyarakat perkotaan walaupun bermukim di pedesaan dimana desa-desa memiliki akses yang cukup untuk memenuhi suasana kehidupan perkotaan atau dalam arti membangun kota kota baru yang lebih banyak, dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya upaya upaya pencegahan terhadap tingginya migrasi out (penduduk keluar) ketimbang migrasi in (penduduk yang masuk).

Dalam upaya pencapaian kondisi yang diinginkan yaitu terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar kecamatan dan penciptaan kondisi kehidupan urban perkotaan di pedesaan sehingga konsentrasi penduduk terkendali maka strategi diperlukan adalah :

1. Menumbuhkan kondisi yang kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis,
2. Menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui penciptaan usaha wirausaha, industri pengolahan (manufaktur) baru.terutama di perdesaan
4. Mengendalikan kuantitas dan kualitas penduduk di suatu daerah tertentu.
5. Memperluas kesempatan kerja yang lebih produktif.
6. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran.
7. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
8. Meningkatkan infrastruktur pemukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru.

Untuk pencapaian tujuan penggerakan mobilitas penduduk perlu dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan penanganan mobilitas non permanen, dengan cara menyediakan fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah yang di proyeksikan sebagai tempat tujuan mobilitas penduduk
2. Mengurangi mobilitas penduduk ke kota dan mendorong ketersediaan sarana prasarana untuk membangun kondisi kehidupan penduduk perkotaan di pedesaan.
3. Meningkatkan promosi daerah-daerah tujuan migrasi baru sehingga penduduk terangsang untuk melakukan perpindahan secara spontan.
4. Membuat regulasi kepada penduduk migran ( non permanen) dengan tujuan dan sasaran menghambat bagi minat penduduk yang tidak berkualitas.

Dalam rangka pengarahannya mobilitas penduduk, maka dalam jangka pendek maupun menengah dan panjang, perlu dirumuskan beberapa sasaran pengarahannya mobilitas penduduk yang antara lain meliputi hal berikut:

1. Pengembangan kebijakan lokal yang pro masyarakat asli tanpa mengurangi hak hidup pendatang,
2. Penguatan elemen masyarakat sipil dalam capacity building permukiman baru hasil kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk.
3. Penguatan kelembagaan keluarga migran dalam konteks kebijakan kesehatan reproduksi dan kualitas keluarga
4. Strategi kerjasama pengembangan daerah penyangga perkotaan dan pengembangan ekonomi pedesaan sehingga mengurangi minat penduduk desa melakukan pindah ke kota dengan kab/kota perbatasan, sehingga terciptanya kondisi kehidupan perkotaan di pedesaan.
5. Mendorong perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja terutama di wilayah jarang penduduk..

Semua program pokok serta kegiatan-kegiatan utama dari pilar penataan mobilitas dan persebaran penduduk ini yang meliputi persebaran penduduk, kepadatan penduduk, migrasi masuk dan keluarga serta penataan suasana kehidupan perkotaan di pedesaan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, harus tetap mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam system perencanaan pembangunan daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenkelatur Dan Perencanaan dan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, melalui Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2. Program Pengelolaan Tanah Kosong melalui Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat melalui Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
4. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya melalui Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)

5. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri yang diarahkan ke wilayah mendukung terjadinya pemerataan persebaran penduduk dan keseimbangan daya dukung serta daya tampung lingkungan
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi melalui Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah
7. Program Pengembangan Kawasan Trasmigrasi melalui Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

**5.4. Roadmap Pernbangunan Keluarga Yang diinginkan dan Pokok-Pokok Program Pembangunan.**

**Gambar 5.4.7. Roadmap Pernbangunan Keluarga Yang diinginkan dan Pokok-Pokok Pembangunan.**

<b>ROADMAP 2021-2025</b>	<b>ROADMAP 2026-2030</b>	<b>ROADMAP 2031-2035</b>	<b>ROADMAP 2036-2040</b>	<b>ROADMAP 2041-2045</b>
Terciptanya kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Meningkat dan bertambahnya kondisi keluarga berdasar kan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Terciptanya kondisi keluarga sejahtera, sehat, maju dan mandiri dengan jumlah anak ideal (dua) dalam keharmonisan yang berkeadilan dan kesetaraan gender	Terwujudnya keluarga kecil, yang berkualitas sejahtera dan berketahanan sosial, mandiri dan berdaya saing	Terciptanya keluarga kecil, yang berkualitas sejahtera dan berketahanan sosial, mandiri dan berdaya saing serta bermartabat

**Gambar 5.4.8. Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pembangunan Keluarga**

<b>Indikator/ Parameter</b>	<b>Periode Roadmap 2021-2045</b>					
	<b>2021</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>	<b>2040</b>	<b>2045</b>

- Persentase penduduk miskin (%)	9,35	9,0	8,2	7,4	6,6	5,9
- Indeks Pembangunan Gender	98,89	90,3	92,1	93,9	95,8	97,6
- Indeks Pembangunan Keluarga	51,72	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0

Kondisi yang diinginkan dalam aspek pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga Kabupaten Pakpak Bharat yang berkualitas meliputi :

1. Keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu keluarga yang berdasarkan perkawinan yang sah menurut agama, dan hukum negara.
2. Keluarga Sehat, Maju dan Sejahtera serta berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal (dua).
3. Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga, keluarga yang berwawasan nasional, keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara.

Adapun pokok-pokok pembangunan keluarga: meliputi :

1. Membangun keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
3. Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sahat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan
4. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara.
5. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Adapun sasaran Pembangunan Keluarga adalah ::

1. Seluruh keluarga dan semua siklus kehidupan keluarga;
2. Keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan ekonomi;
3. Keluarga rentan, tidak harmonis rentan dalam hal sosial, lingkungan maupun budaya;
4. Keluarga yang bermasalah secara ekonomi, sosial, fisik dan fisikis;

Adapun pokok-pokok program untuk membangun iklim berkeluarga adalah :

1. Meningkatkan pelayanan lembaga penasehat perkawinan membangun pusat-pusat konseling pra nikah,
2. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga .
3. Komitmen pemerintah hanya mengakui perkawinan antar laki-laki dan perempuan.
4. Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan negara

Dalam rangka Menangani Indikator penurunan keluarga miskin maka dilakukan program pokok sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social
3. Program pembinaan anak terlantar
4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
5. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
6. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
7. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
8. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
9. Program pengembangan perumahan
10. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Semua program pokok serta kegiatan-kegiatan utama dari pilar pembangunan keluarga ini yang dilakukan oleh berbagai organisasi perangkat daerah terkait harus tetap mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam system perencanaan pembangunan daerah.yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenkelatur Dan Perencanaan dan Keuangan Daerah .meliputi ;

1. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), meliputi ; Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Program Pengelolaan Persampahan,
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, meliputi Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam

rangka stabilitas pasokan dan harga pangan,

4. Program Rehabilitasi Sosial, meliputi Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.
5. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial meliputi Pemeliharaan Anak Terlantar, Pengelolaan Data Fakir Miskin,
7. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, melalui Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah.
8. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
9. Program Perlindungan Perempuan meliputi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga meliputi Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak serta Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
11. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) melalui Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
12. Program Pengembangan UMKM melalui Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.
13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, melalui Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

#### **5.5. Roadmap Pembangunan Data Base Kependudukan yang Diinginkan dan Pokok-Pokok Pembangunan**

**Gambar 5.5.9. Roadmap Pembangunan Data Base Kependudukan yang Diinginkan dan Pokok-Pokok Pembangunan**

<b>ROADMAP 2021-2025</b>	<b>ROADMAP 2026-2030</b>	<b>ROADMAP 2031-2035</b>	<b>ROADMAP 2036-2040</b>	<b>ROADMAP 2041-2045</b>
Terciptanya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan prima administrasi kependudukan	Tercapainya kondisi masyarakat berbasis data base kependudukan	Terselenggaranya pengintegrasian data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu data base dan bebas diakses dan pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai sistem pendukung keputusan	Terintegrasinya data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu data base dan bebas diakses dan pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai sistem pendukung keputusan	Terciptanya integrasi dan pendayagunaan data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu data base dan bebas diakses sebagai sistem pendukung keputusan

**Gambar 5.5.10. Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Penataan Manajemen *Database & Informasi* Kependudukan**

<b>Indikator</b>	<b>Periode Roadmap 2021-2045</b>				
	<b>2021- 2025</b>	<b>2026- 2030</b>	<b>2031- 2035</b>	<b>2036- 2040</b>	<b>2041- 2045</b>
<b><i>Indikator Kualitatif</i></b>					
Konsolidasi ke dalam dan tertib administrasi kependudukan	86,9	100	100	100	100
Pelayanan prima administrasi kependudukan	75	80	100	100	100
Pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan ( <i>knowledge base society</i> )	10	30	50	70	90

Integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber ke dalam suatu database yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan	50	100	100	100	100
Peningkatan pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai Sistem Pendukung Keputusan ( <i>Decision Support System</i> )	75	80	100	100	100
<i>Indikator Kuantitatif</i>					
Persentase penduduk dapat menunjukkan catatan sipil berupa akte kelahiran dll (%)	86,9	100	100	100	100
Persentase penduduk menguasai akses computer (%)	10	30	50	70	90

Kondisi yang diinginkan pada pembangunan database kependudukan adalah terwujudnya database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi mudah diakses bagi pemilik kepentingan.

Dalam rangka menyikapi kondisi yang ada serta target pencapaian sampai tahun 2045 yang akan datang maka ditentukan arah dan kebijakan pembangunan manajemen database dan informasi kependudukan sebagai berikut:

1. Pembangunan sistem data dan informasi kependudukan melalui pematapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).
2. Pengembangan data base kependudukan untuk mencapai acuan bagi perencanaan pemerintah daerah.
3. Pematapan fungsi dan peranan data base kependudukan Kabupaten Asahan yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan pelayanan prima.
3. Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga yang telah ada

4. Menyiapkan dan melayani kebutuhan data dan informasi kependudukan untuk kebutuhan lintas sektor dengan menerbitkan profil kependudukan..

Semua program pokok serta kegiatan-kegiatan utama dari pilar penataan data base dan informasi penduduk ini yang meliputi penyiapan administrasi kependudukan, pelaksanaan pelayanan yang prima, pengintegrasian dan pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan serta perencanaan pembangunan harus tetap mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam system perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenkelatur Dan Perencanaan dan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Program Pendaftaran Penduduk, meliputi ; Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
2. Program Pencatatan Sipil, meliputi Pelayanan Catatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi ; Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan serta Penyajian Database Kependudukan, Penataan Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan meliputi ; Penyusunan Profil Kependudukan

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Untuk mencapai kemajuan Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan visi dan misi pemerintahnya, maka menciptakan penduduk yang berkualitas sudah menjadi suatu keharusan yang sangat esensial serta menjadi prioritas utama dalam pembangunan.

Perkembangan Kependudukan isu-isu strategis serta dampaknya dalam jangka waktu 25 tahun yang akan datang sangat mengkhawatirkan jika tidak ditangani dengan serius dan dapat mengancam masalah-masalah kependudukan dan pembangunan lainnya di Kabupaten Pakpak Bharat.

Dari berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam berbagai pilar pembangunan kependudukan berupa kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga serta database kependudukan, harus dapat dijadikan kesempatan untuk dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan berbagai sektor pembangunan secara sistematis dengan mengacu kepada roadmap yang telah direncanakan.

Komitmen dan perhatian penuh dari pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan berbagai pihak untuk memprioritaskan pembangunan kependudukan dengan penanganan secara berkelanjutan harus segera dilakukan guna mewujudkan kesadaran bersama betapa pentingnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan,

Berbagai tantangan baik global yang menyangkut perubahan mendasar dinamika kependudukan, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan berkembangnya peradaban baru yang membuka cakrawala baru pandangan dunia, negara dan masyarakat akibat terjadinya pandemi virus corona covid 19 serta berbagai kebijakan pasar bebas, revolusi teknologi, informasi, telekomunikasi dan transportasi mengharuskan adanya peningkatan koordinasi, keterpaduan, penyerasian serta kemitraan lintas sektor dan fungsional yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, promosi, dan fasilitasi dalam menentukan kebijakan serta program-program pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan yang mengarah ke masa depan selama 25 tahun yang akan datang.

*Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)* selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan dan secara khusus juga akan dijadikan acuan serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, dengan arah kebijakan dan pokok-pokok

pembangunan kependudukan diharapkan akan terwujudnya kondisi penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang Tumbuh Seimbang, Berkualitas, yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan serta bermartabat tahun 2045.

Grand Design Pembangunan Kependudukan akan ditindaklanjuti dalam bentuk sosialisasi, advokasi dan monitoring terhadap berbagai pemangku kepentingan dan kebijakan baik tingkat Kabupaten Pakpak Bharat maupun pada tingkat Kecamatan melalui suatu Tim Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat yang dibentuk dan diterbitkan Surat Keputusannya oleh Bupati Pakpak Bharat, serta akan ditingkatkan regulasinya pada masa yang akan datang dalam bentuk Peraturan Daerah atau Perda.

Untuk menilai keberhasilan atas implementasi dari Grand Design Pembangunan Kependudukan ini ke depan akan terlihat dalam berbagai dimensi terutama yang berhubungan dengan : Pertama, **dimensi partisipasi penduduk**, yakni untuk mengetahui sejauhmana penduduk sudah terlibat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi semua program dan rencana aksi yang telah disusun, Kedua, **dimensi sustainability**, yakni untuk melihat pembangunan yang dilaksanakan telah menjamin keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosial, Ketiga, **dimensi Integrasi**, yakni suatu proses pembangunan yang telah mengintegrasikan aspek kependudukan (demografi) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Keempat, **dimensi Pro penduduk/rakyat**, yakni untuk melihat seberapa besar alokasi anggaran yang disediakan untuk kebutuhan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, dan Kelima, **dimensi kesetaraan**, yakni keterlibatan dan partisipasi penduduk perempuan (gender) dalam berbagai sektor pembangunan.

BUPATI PAKPAK BHARAT

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR